



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
KELURAHAN RANCANUMPANG KECAMATAN
GEDEBAGE KOTA BANDUNG**

**PROGRAM STUDI PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL**

PEMBIMBING:

Dra.Teta Riasih, MP

Oleh:

Gladys Lucky Salsabilla

2003062

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM
LABORATORIUMN PROGRAM
STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL DI
KELURAHAN RANCANUMPANG,
KECAMATAN GEDEBAGE, KOTA
BANDUNG

Nama Mahasiswa : Gladys Lucky Salsabilla
NRP : 2003062
Program : Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing :



Dra. Teta Riasih, MP.

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,



Lina favourita Sutiaputri, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiraat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, serta petunjuk dan kemudahan yang selalu diberikan oleh-Nya praktikan mampu melaksanakan Praktikum Laboratorium dengan tetap bersyukur dan mampu menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ini dengan tepat waktu. Tersusunnya laporan ini tentu bukan karena buah kerja keras praktikan semata, melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Dr. Marjuki, M.Sc, selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Dra. Teta Riasih, MP. selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan praktikum laboratorium;
5. Bapak E. Purwantono dan Ibu Titiek Suparti selaku orang tua praktikan yang telah memberikan dukungan serta doa kepada Praktikan.
6. Bapak Sapaat, S.Sos., M.AP selaku Lurah Rancanumpang Kecamatan Gedebage atas bantuan dan arahnya selama praktikum dilaksanakan.
7. Rekan-rekan anggota kelompok 7 yang selalu memberikan motivasi selama pelaksanaan praktikum laboratorium;
8. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan mendoakan terlaksananya kegiatan praktikum laboratorium.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Waktu dan Lokasi Praktikum.....	3
D. Proses Praktikum.....	3
E. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	10
A. Profil Analis Jaminan Sosial	10
B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial	24
C. Profil Analis Pemberdayaan Sosial.....	38
D. Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial.....	52
E. Profil Analis Penanggulangan Bencana	66
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Bentuk kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial	18
Tabel 2.2	Sistem Partisipan Profil Analisis Jaminan Sosial	18
Tabel 2.3	Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Jaminan Sosial	20
Tabel 2.4	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Jaminan Sosial....	21
Tabel 2.5	Jadwal Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial	22
Tabel 2.6	Bentuk kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	33
Tabel 2.7	Sistem Partisipan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	34
Tabel 2.8	Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	35
Tabel 2.9	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	36
Tabel 2.10	Jadwal Kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	37
Tabel 2.11	Bentuk kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	47
Tabel 2.12	Sistem Partisipan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	48
Tabel 2.13	Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	49
Tabel 2.14	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	50
Tabel 2.15	Jadwal Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	51
Tabel 2.16	Bentuk kegiatan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	60

Tabel 2.17	Sistem Partisipan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	61
Tabel 2.18	Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	62
Tabel 2.19	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan sosial.....	63
Tabel 2.20	Jadwal Kegiatan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	64
Tabel 2.21	Bentuk kegiatan Profil Analisis Penanggulangan Bencana	76
Tabel 2.22	Sistem Partisipan Profil Analisis Penanggulangan Bencana	77
Tabel 2.23	Rencana Anggaran Biaya Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	78
Tabel 2.24	Analisis Kelayakan Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	80
Tabel 2.25	Jadwal Kegiatan Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Bimbingan Pra Lapangan Oleh dosen pembimbing	4
Gambar 1.2	Serah terima Praktikan.....	5
Gambar 1.3	Pembekalan Profil Analisis Jaminan Sosial	6
Gambar 1.4	Pembekalan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	6
Gambar 1.5	Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	7
Gambar 1.6	Pembekalan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	7
Gambar 1.7	Pembekalan Profil Analisis Penanggulangan Bencana	8
Gambar 2.1	<i>Community Meeting</i>	14
Gambar 2.2	Analisis Pohon Masalah profil analisis jaminan sosial	16
Gambar 2.3	Analisis Pohon Masalah profil analisis sumber dana bantuan sosial	31
Gambar 2.4	Analisis Pohon Masalah profil analisis pemberdayaan sosial.....	45
Gambar 2.5	Analisis Pohon Masalah profil analisis Penataan Lingkungan Sosial	57
Gambar 2.6	Analisis Pohon Masalah profil analisis penanggulangan Bencana	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, mezzo, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial.

Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, terkait fenomena permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

B. Tujuan dan manfaat praktikum

1. Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki:

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama

- dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 - d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 - e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - 1) Pendekatan Awal
 - 2) Asesmen
 - 3) Perencanaan Intervensi

2. Manfaat Praktikum

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

- 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan awal
 - b) Asesmen
 - c) Rencana Intervensi

b. Bagi Lembaga

- 1) Meningkatkan kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

C. Waktu dan lokasi Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilakukan di kelurahan Rancanumpang tempat tinggal masing-masing praktikan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1) Pra Lapangan

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a) Pembekalan | : 25 Januari - 2 Februari 2023 |
| b) Pelepasan Praktikan | : 8 Februari 2023 |

2) Lapangan (outdoor) : 8 Februari - 15 April 2023

3) Pasca Lapangan

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Bimbingan laporan | : 16 - 26 April 2023 |
| b) Pendaftaran ujian | : 27 - 29 April 2023 |
| c) Ujian Lisan Praktikum | : 02 - 03 Mei 2023 |

D. Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembekalan Umum

Pembekalan Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Februari 2023 pada pukul 08.30-11.30 WIB secara Luring di Auditorium Poltekesos Bandung. Pembekalan ini dihadiri oleh Mahasiswa Praktikan Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Semester VI, Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Prodi D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Ibu Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Ketua Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, serta Para Dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Agenda kegiatan pembekalan praktikum ini yaitu menjelaskan mengenai isi pedoman praktikum laboratotium.

b. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:



Gambar 1.1 Bimbingan Pra Lapangan Oleh dosen pembimbing

- 1) Pada pertemuan pertama, dilakukan perkenalan terlebih dahulu, pembahasan pedoman praktikum dan jadwal pelaksanaan praktikum.
 - 2) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
 - 3) Membuat scenario dan timeline Praktikum.
- c. Serah terima praktikan prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial kepada masing-masing Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Gedebage.**



Gambar 1.2 Serah Terima Praktikan

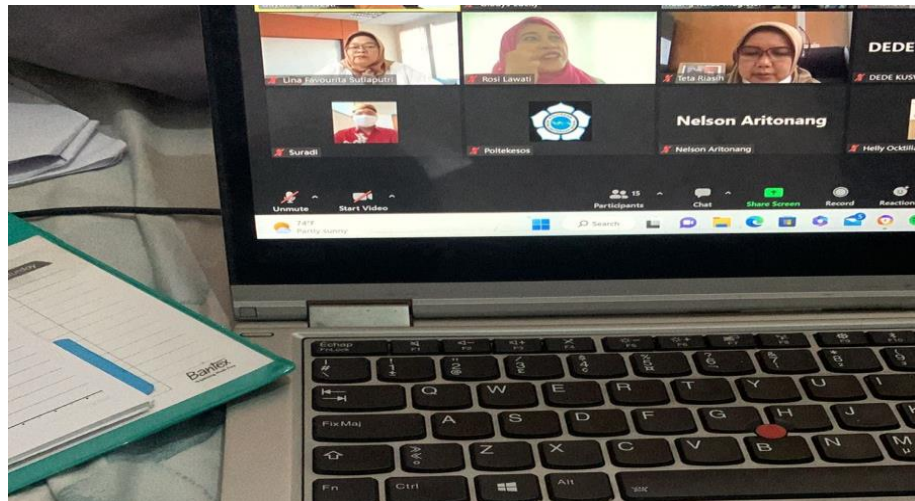
2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayastos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Analis Jaminan Sosial

Mengadakan pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023, Oleh ibu Gayatri Wasitra Nirwesti, S.Mn,MSE yang membahas mengenai Kebijakan dan struktur Jaminan Sosial,Tantanga program jaminan sosial di Indonesia,dan Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial.Dalam pelaksanaannya Praktikan akan mencari isu Masalah yang berkaitan dengan program jaminan sosial yang ada di Kelurahan Rancanumpang yang dapat dilakukan melalui Wawancara serta mengadakan *Community Meeting* yang dihadiri oleh warga RW 01 Kelurahan Rancanumpang.

Dalam pelaksanaan *Community Meeting* Praktikan dibantu Oleh Ibu Susi selaku Ketua RW 01 dalam pengumpulan peserta, kegiatan ini berjalan Lancar dikarenakan Peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan rangkaian acara yang telah dibuat.



Gambar 1.3 Pembekalan profil Analisis Jaminan Sosial

b. Analisis sumber dana bantuan sosial

Sebelum Praktikan turun langsung, praktikan akan diberikan terlebih dahulu pembekalan terkait dengan sumber dana bantuan sosial yang dilaksanakan pada 22 Februari 2023, Praktikan melakukan wawancara yang berkaitan dengan fokus masalah yang diambil terkait dengan sumber dana bantuan sosial. Praktikan juga menggunakan informasi melalui data sekunder seperti artikel.



Gambar 1.4 Pembekalan Profil sumber dana bantuan sosial

c. Analisis Pemberdayaan sosial

Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maarif dilakukan pada 8 Maret 2023, yang didalamnya terdapat

materi mengenai Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Aktor dalam Program Pemberdayaan, Tahapan Pemberdayaan, Penyelenggaraan Pemberdayaan serta Peran dan Keterampilan Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan.



Gambar 1.5 Pembekalan profil analis pemberdayaan Sosial

d. Analisis penataan Lingkungan Sosial

Diadakan pembekalan pada tanggal 24 Maret 2023 mengenai Gambaran umum penataan lingkungan sosial (dikaitkan dengan green social work), Kompetensi yang dibutuhkan untuk praktek penataan lingkungan sosial, dan Peluang kerja pada bidang penataan sosial



Gambar 1.6 Pembekalan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

e. **Analisis Penanggulangan Bencana**

Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh bapak Mohd Robi Amri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tanggal 5 April 2023 dengan materi, Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan di Indonesia, Peran Masyarakat dan Para Pihak dalam upaya Antisipasi Bencana, Kegiatan dan Tantangan Penanggulangan Bencana, Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dan Gambaran Peran dalam Upaya Penanggulangan Bencana



Gambar 1.7 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana

3. **Pasca Lapangan**

- a) Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
- b) Ujian Lisan Praktikum
- c) Perbaikan dan penyerahan laporan

E. **Sistematika Laporan**

Pada akhir kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan akhir yang mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum laboratorium dari awal hingga akhir kegiatan. Mahasiswa diwajibkan menyusun laporan akhir secara individu dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, sasaran kegiatan praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan.

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM, yang berisi tentang Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, dan rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, yang berisi kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditujukan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan tenaga kerja sebagai suatu unsur penting yang menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dimana tenaga kerja memiliki arti dan peranan penting dengan perusahaan (Agusmidah, 2010:129). Untuk itu, menurut Manulang (2001:37) sudah sewajarnya apabila kepada tenaga kerja diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan. Bentuk perlindungan dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja selama ini diwujudkan dalam berbagai cara dan kebijakan, salah satunya adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Undang-undang mengamanatkan bahwa Jaminan ketenagakerjaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja. Seperti yang disebutkan oleh badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa jumlah pekerja di sektor informal meningkat pesat pada Februari 2017, yaitu mencapai 58,35 persen (131,55 juta orang) dibandingkan sektor formal yang hanya 41.65 persen (124,54 juta orang). Namun tidak semua dari mereka memiliki bahkan tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan dan santunan berupa uang.

Program BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi solusi dalam upaya pemberian perlindungan bagi tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh para pengusaha atau perusahaan yang memberi pekerjaan. Hal tersebut terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, agar para pekerja di sector formal maupun informal mempunyai tabungan untuk keberlangsungan hidup ketika tidak lagi bekerja. Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Namun, belum semua pekerja terdaftar sebagai peserta di jaminan tersebut.

Banyaknya jumlah tenaga kerja di sektor informal yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan hari tua. Disebabkan salah satunya oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang

bekerja di sector informal mengenai manfaat dari Jaminan itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Jaminan hari tua hanya bisa di klaim oleh pekerja formal. Kesalahpahaman ini membuat banyak pekerja sector informal yang memilih untuk tidak mengikuti kepesertaan, padahal pekerja informal juga memiliki hak atas jaminan sosial.

2. Tinjauan Konsep yang relevan dengan masalah

a. Konsep Jaminan Sosial

1) Pengertian

Jaminan sosial merupakan adalah salah satu bentuk perlindungan social yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat“.

2) Dasar Hukum

Jaminan sosial pada dasarnya merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh Negara. Dasar pembentukan badan untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatnya pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya dilengkapi dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yang dibuat atas pertimbangan tiga hal, yakni:

- (a) Bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
- (b) Bahwa untuk memberikan jaminan yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

3) Jenis jaminan social

Penyelenggaraan program jaminan sosial terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Jaminan Kesehatan
- b) Jaminan Kecelakaan Kerja
- c) Jaminan Hari Tua
- d) Jaminan Pensiun
- e) Jaminan Kematian

b. BPJS Ketenagakerjaan

1) Pengertian

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah program jaminan sosial dan proteksi atau perlindungan yang ditujukan bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2004, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang- undang untuk menyelenggarakan Program Jaminan sosial. Selanjutnya, menurut Undangundang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka BPJS merupakan Lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

2) Visi & Misi BPJS Ketenagakerjaan

- a) Visi
Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia
- b) Misi
 - (1) Melindungi, Melayani & Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga
 - (2) Memberikan rasa Aman, Mudah & Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Peserta
 - (3) Memberikan Kontribusi dalam Pembangunan dan Perekonomian Bangsa dengan Tata Kelola Baik

c. Jaminan Hari Tua

1) Pengertian

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta

menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2) **Manfaat**

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta, dengan ketentuan:

- a) Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. (pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) PP 46/2015)
- b) Diluar kondisi tersebut, pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun (pasal 37 ayat (3) UU 40/2004 jo. pasal 22 ayat (4) PP 46/2015).
- c) Batas tertentu yang dimaksud adalah paling banyak 30% dari total saldo JHT, yang peruntukan untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu tersebut hanya dapat dilakukan untuk 1 kali selama menjadi peserta (pasal 22 ayat (5) dan (6) PP 46/2015)

3. **Asesmen**

Asesmen dilakukan oleh praktikan menggunakan Metode wawancara, studi dokumentasi, dan *Community Meeting*. Wawancara dilakukan dengan Ibu Susi Selaku Ketua RW 01 Kelurahan Rancanumpang dan *Community Meeting* dilakukan di Madrasah yang terletak di RW 01 yang dihadiri oleh warga RW 01 yang sebagian besar bekerja pada sektor Informal.

a. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka keseluruhan program BPJS tersebut bersifat mandatory/ wajib bagi seluruh tenaga kerja, di mana setiap pekerja/ buruh serta keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memberikan perlindungan baik pada saat aktif bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun.

Namun dari hasil wawancara di RW 01 Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage yang diperoleh praktikan melalui *Community meeting*, pesertanya belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Hari Tua, sebanyak 50 peserta *Community meeting* tidak mengetahui bahwa pekerja pada sektor informal dapat mengikuti kepesertaan dari Jaminan Hari Tua, karena para peserta *Community meeting* yang berprofesi sebagai Buruh hanya mengetahui kalau JHT hanya bias di ikuti oleh pekerja kantoran. Jaminan Hari tua merupakan Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sehingga, Hal ini dapat menjadi perhatian karena apabila para pekerja informal mulai memasuki masa tidak produktif lagi mereka tidak memiliki jaminan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



Gambar 2.1 *Community Meeting*

1) Penyebab masalah

- **Belum ada informasi kepada warga mengenai manfaat dan kepesertaan Jaminan hari Tua**

Melalui hasil *Community meeting* yang dilakukan oleh praktikan yang dihadiri oleh para pekerja informal, sebanyak 50 peserta belum mengetahui pentingnya manfaat dari jaminan hari tua dan juga para peserta mengira JHT hanya bisa diikuti oleh para pekerja kantoran.

- **Rendahnya pemahaman pekerja informal terkait risiko hari tua dimasa mendatang**

Setiap pekerja tentunya memiliki risiko yaitu tidak terjaminnya pendapatan pekerja informal di hari tua. Apabila risiko ini terjadi,

Maka para pekerja informal tidak lagi memiliki pendapatan yang biasanya didapatkan dari hasil kerjanya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan mereka apabila memasuki masa tua. Hal ini yang belum disadari oleh pekerja informal di Kelurahan Rancanumpang

2) Dampak Masalah

- **Tidak adanya jaminan apabila pekerja sudah tidak bisa produktif karena memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia**

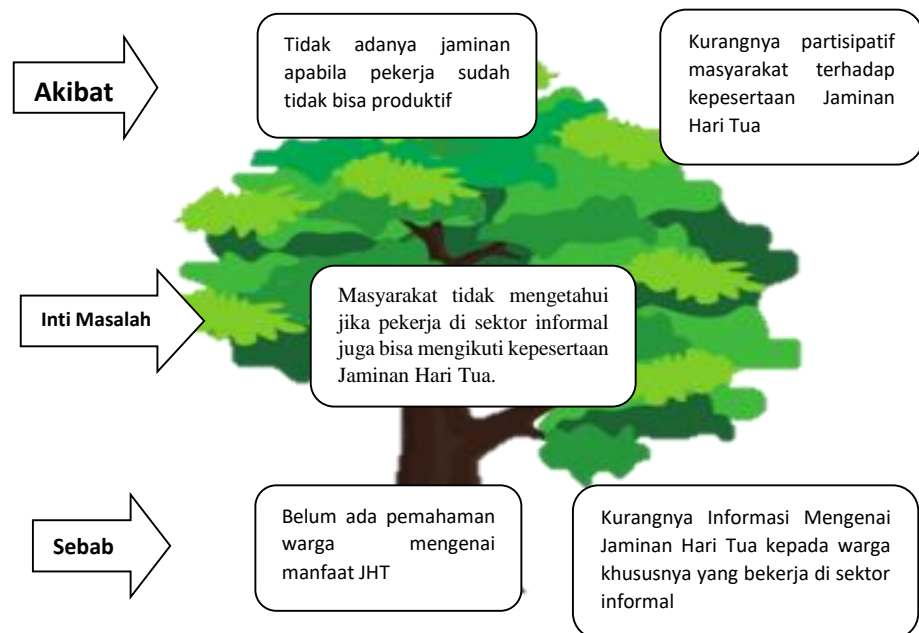
Karena JHT memiliki manfaat yaitu untuk memberikan jaminan apabila pekerja memasuki masa tuanya, sehingga apabila para pekerja tidak mengikuti JHT mereka tidak akan mendapatkan jaminan karena manfaat ini hanya bias dirasakan oleh peserta JHT.

- **Partisipasi masyarakat terhadap kepesertaan Jaminan Hari Tua kurang**

Kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat dari JHT sendiri berdampak pada kurangnya minat masyarakat dalam partisipasi masyarakat khususnya pekerja pada sektor informal di kelurahan Rancanumpang

3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi dari hasil *Community Meeting*, praktikan menentukan masalah yaitu Dari 50 peserta yang mengikuti *Community Meeting* pesertanya tidak mengetahui jika pekerja di sektor informal juga bisa mengikuti kepesertaan Jaminan Hari Tua. Akibatnya, kurangnya partisipasi masyarakat terkait dengan kepesertaan Jaminan Hari tua. Sehingga, tidak adanya jaminan apabila pekerja sudah tidak bisa produktif karena memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan analisis oleh praktikan dengan melakukan analisis sebab akibat permasalahan menggunakan Teknik/ tools analisis pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Analisis Pohon masalah Analisis Jaminan Sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah program Jaminan Hari Tua di Kelurahan Rancanumpang Masyarakat tidak mengetahui bahwa Jaminan Hari tua bisa diklaim oleh pekerja di sektor Informal, maka membutuhkan sosialisasi mengenai Kepesertaan JHT. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pemahaman Masyarakat terhadap Manfaat dan sasaran dari JHT serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengikutsertakan diri ke JHT sehingga masyarakat mendapatkan jaminan apabila sudah tidak bisa produktif. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk Seluruh pekerja pada sektor informal di Kelurahan Rancanumpang.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

- Pekerja sosial
 - Pekerja sosial dalam permasalahan ini bertugas sebagai inisiator dalam pemecahan permasalahan Banyaknya pekerja di Kelurahan Rancanumpang yang tidak memiliki kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana program bersama dengan perusahaan dan stakeholder serta sebagai penghubung antara sistem sasaran dengan sistem sumber.
- BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung

BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung dapat dilibatkan untuk memberikan informasi mengenai program-program, manfaat, besaran iuran, cara mengakses, dan resiko apabila tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sekaligus sebagai pengawas dan pengontrol perusahaan terkait dengan keikutsertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan.

- **Karang Taruna**

Karang taruna merupakan organisasi untuk wadah generasi muda sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pada saat mengadakan *Community Meeting* yang dihadiri oleh 50 peserta. Seluruh peserta yang merupakan pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan Hari Tua dan 50 persen dari peserta tidak mengetahui kalau mereka dapat mengikuti kepesertaan JHT.

Adanya kesalahpahaman ini minimnya kepesertaan masyarakat terhadap jaminan Hari Tua. Hal ini juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terkait dengan manfaat Jaminan hari Tua khususnya untuk pekerja pada sektor informal.

Tidak adanya kepesertaan ini membuat pekerja pada sektor informal tidak memiliki jaminan ketika mereka sudah memasuki masa tidak produktif lagi. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan penginformasian yang jelas agar masyarakat dapat dengan perlahan mengerti.

b. Tujuan umum dan khusus

Dengan kegiatan ini, adanya tujuan umum yaitu untuk memberikan pemecahan masalah kepada warga Kelurahan Rancanumpang terhadap permasalahan Program Jaminan Sosial yang terjadi.

Berikut tujuan khusus diadakannya kegiatan ini yaitu, antara lain:

- Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat Program JHT.
- Memberikan informasi kepada masyarakat terkait siapa saja yang dapat mengikuti Jaminan Hari Tua.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Sosialisasi mengenai manfaat dan kepesertaan Jaminan Hari Tua

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan

tanggapan serta reaksinya. Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya Sosialisasi adalah agar Masyarakat di Kelurahan Rancanumpang dapat mengetahui bahwa kepesertaan JHT juga diperuntukkan untuk Pekerja di sektor Informal jadi tidak hanya pengusaha yang bisa mengklaim JHT

Tabel 2.1 Bentuk Kegiatan Analis Jaminan Sosial

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
1.	Sosialisasi mengenai manfaat dan kepesertaan Jaminan Hari Tua	memberikan pemecahan masalah kepada warga Kelurahan Rancanumpang terhadap permasalahan Program Jaminan Sosial yang terjadi.	Seluruh Pekerja informal di kelurahan Rancanumpang	1. Pekerja Sosial 2. BPJS Ketenagakerjaan	1 Hari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat jaminan Hari Tua dan kepesertaan dari jaminan Hari tua serta masyarakat berpartisipasi dalam kepesertaan Jaminan Hari Tua

d. Sistem Partisipan

Dalam program peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan kepesertaan JHT, terdapat system partisipan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sistem Partisipan Analisis Jaminan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator system	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Pekerja informal Kelurahan Rancanumpang

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
4.	Support System	1. Dinas Sosial 2. BPJS Ketenagakerjaan
5.	Controlling System	Pekerja Sosial
6.	Implementing System	3. Pekerja Sosial 4. BPJS Ketenagakerjaan
7.	Target System	1. Pekerja Sektor informal 2. BPJS Ketenagakerjaan
8.	Action System	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan adalah *Community Organization* atau pengorganisasian masyarakat yaitu proses untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan. Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1. Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan pengubahan cara-cara penanganan masalah kesejahteraan sosial, demi tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial individu keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Penyuluhan sosial sebagai proses Pendidikan (edukasi, yaitu suatu sistem Pendidikan nonformal untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berbudaya agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Pada pelaksanaan program peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan kepesertaan JHT, terdapat Rencana anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk jalannya program tersebut. Maka dibentuk Rencana anggaran biaya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Anggaran Biaya profil analisis jaminan sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	5	Pack	50.000,00	250.000,00
	Sound System	2	Unit	125.000,00	250.000,00
	Banner kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
	Tali Raffia	2	Roll	10.000,00	10.000,00
	Infokus	1	Unit	100.000,00	100.000,00
	Layar Proyektor	1	Unit	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				785.000,00
2.	Honorarium				
	BPJS Ketenagakerjaan	2	Orang/Jam	1.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah II				2.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				500.000,00
	Jumlah Keseluruhan				3.285.000,00

2) Alat Yang Dibutuhkan

Alat-Alat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya program ini adalah:

- Meja

- Kursi
- Laptop
- Banner
- Proyektor
- Alat tulis
- Sound system

g. Analisis kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.4 Analisis Kelayakan Program analisis Jaminan Sosial

Analisis SWOT	Strength (Kekuatan) : 1. Adanya Narasumber yang tepat 2. Kegiatan didukung oleh pihak terkait dan pemerintah daerah	Weakness (Kelemahan) : Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan
Opportunities (Peluang) : 1. Dapat meningkatkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja di perusahaan. 2. Memberikan jaminan dan perlindungan kepada pekerja.	Strategi SO : 1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah	Strategi WO : 1. Penyampaian Sosialisasi yang menarik dan menggunakan komunikasi dua arah 2. Penyampaian Sosialisasi dengan Bahasa yang mudah dipahami
Threats (Ancaman) : Peserta tidak datang mengikuti kegiatan	Strategi ST : Membuat doorprize dalam kegiatan	Strategi WT : 1. Meningkatkan Intensitas pembinaan secara langsung kepada peserta 2. Melakukan moneva

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1. Jadwal kegiatan

Tabel 2.5 Jadwal Kegiatan profil analisis Jaminan Sosial

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.30 – 08.45	15 Menit	MC
4.	Sambutan	08.45 – 09.00	15 Menit	Pihak Kelurahan
5.	Pembacaan Do'a	09.00 – 09.10	10 Menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai pentingnya keikutsertaan Masyarakat dalam Jaminan Hari Tua dan Manfaat dari jaminan Hari Tua	09.10 – 10.40	90 Menit	BPJS Ketenagakerjaan
7.	Sesi tanya Jawab	10.40 – 11.00	20 Menit	Peserta
8.	Dokumentasi	11.00 – 11.15	15 Menit	Panitia
9.	Penutupan	11.15 – 11.20	5 Menit	MC

2. Langkah-langkah

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam Program Peningkatan Pengetahuan masyarakat khususnya Pekerja pada sektor informal Mengenai keikutsertaan Pekerja Dalam jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Tahap persiapan terdapat kegiatan sebagai berikut:

- **Membentuk panitia kegiatan**

Pembentukan panitia kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang dilibatkan merupakan perwakilan dari semua unsur yang terlibat. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk koordinasi diantara sumber daya manusia yang terlibat.

- **Menyusun rancangan kegiatan program**

Pada kegiatan penyusunan rancangan kegiatan ini akan dilakukan kegiatan brain storming diantara semua panitia kegiatan mengenai pelaksanaan bentuk kegiatan, pengisi kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Rancangan kegiatan dibuat sedetail mungkin untuk memudahkan dalam penyusunan proposal kegiatan.

- **Menyusun proposal**

kegiatan Penyusunan proposal ini dilakukan dengan melibatkan semua panitia kegiatan. Penyusunan proposal kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam upaya memperoleh izin pelaksanaan program, ditujukan dalam upaya mencapai program pemerintah yang sesuai, dan ditujukan untuk memperoleh persetujuan dengan narasumber.

- **Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan kegiatan**

Kegiatan persiapan kebutuhan alat dan bahan merupakan kegiatan pengumpulan alat dan bahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Panitia melakukan pengecekan terkait kecukupan alat dan bahan yang diperlukan sesuai perencanaan.

- **Melakukan briefing**

Kegiatan briefing ini diperlukan untuk memastikan koordinasi terakhir sebelum program dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini akan dipimpin oleh ketua panitia dan diikuti oleh semua panitia.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program Peningkatan Pengetahuan masyarakat khususnya Pekerja pada sektor informal Mengenai keikutsertaan Pekerja Dalam jaminan hari tua terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

- **Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi mengenai manfaat dan kepesertaan Jaminan Hari Tua**

Pada pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa langkah yaitu :

1. Persiapan kegiatan oleh seluruh panitia
2. Registrasi peserta
3. Pembukaan kegiatan oleh MC
4. Sambutan
5. Pemaparan Materi
6. Sesi Tanya Jawab
7. Sesi dokumentasi
8. Kesimpulan kegiatan

c. Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan pada tahap ini meliputi evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan.

(1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

2) Sesi Dokumentasi

Melakukan kegiatan foto bersama seluruh peserta, panitia dan system sumber dalam kegiatan sosialisasi ini

B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong (toko, agen). Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Dengan adanya program BPNT dapat membantu untuk mendapatkan cukup pangan serta nutrisi yang lebih seimbang tanpa kendala sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin secara merata.

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang dijadikan sasaran penyaluran BPNT, dimana terdapat 41.000 Keluarga penerima manfaat. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan sosial oleh KPM bersama bank penyalur.

Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kelurahan di Kota Bandung, yang memiliki luas wilayah sebesar 115.652 Ha, Kelurahan Rancanumpang adalah salah satu kelurahan yang bertugas dalam pelayanan masyarakat dan melaksanakan program BPNT. Terdapat 83 Keluarga penerima manfaat di Kelurahan Rancanumpang dan terdapat 2 E-Warong yang dapat digunakan untuk para KPM menukarkan bahan. Dalam penyaluran bantuan, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Kartu tersebut akan diberikan saldo sebesar Rp 110,000,00 perbulan dan KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS.

Dalam pelaksanaannya, pemberian BPNT di Kelurahan Rancanumpang masih belum optimal berdasarkan informasi yang di dapatkan melalui Pendamping PKH yang juga merupakan pendamping BPNT masih terdapat kendala salah satunya adalah Adanya keluhan yaitu pada saat Bantuan yang seharusnya cair, tetapi masih terdapat beberapa KPM yang bantuannya belum cair dikarenakan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki Oleh KPM mengalami Saldo Nol

2. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih.

A. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah merupakan bantuan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Menurut Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan, Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

B. Tujuan Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber

mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

C. Sumber Dana Bantuan Sosial

Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) ada 3 yaitu bersumber dari masyarakat, dana hibah, dan negara antara lain :

1) Negara

Pemerintah mengelola bantuan sosial yang bersumber dari pajak melalui APBN/APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengumpulan uang dan barang serta pengelolaan pajak undian yang dituangkan dalam bentuk Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana bantuan sosial yang bersumber dari Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pajak yang dituangkan dalam APBN/APBD dan UKS. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari negara antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.

2) Hibah Luar Negeri

Negara melalui Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema *Government to Government* (Pemerintah Negara lain kepada pemerintah pusat/daerah), atau *Private to Government* (Swasta/masyarakat/organisasi dari luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah), atau skema *Private to Private* (Masyarakat/swasta/organisasi luar negeri kepada swasta/masyarakat/organisasi dalam negeri) Pelaksanaan bantuan sosial dari luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Tidak untuk mendanai terorisme, radikalisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan bantuan dari luar negeri harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Masyarakat

Sesuai prinsip kesetiakawanan sosial bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, salah satu wujud peran serta

masyarakat yaitu pemberian sumbangan sosial berupa uang atau barang bagi perorangan atau kelompok dengan tujuan agar dana yang terkumpul dapat membantu penanganan permasalahan sosial. Usaha pengumpulan sumbangan sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan sosial adalah pertanggungjawaban terhadap sumbangan sosial yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengumpulan uang dan barang baik secara teknis maupun administratif. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari masyarakat antara lain diperoleh dari kedermawanan orang; Lembaga sosial (rumah zakat, rumah yatim, Baznas, kita bisa.com); dana hibah seperti sumbangan (pengumpulan uang dan barang) dan undian (pajak undian berhadiah); dana berdasarkan kearifan lokal (beas perelek, rereongan sarumpi, beas jimpitan, serikat tolong menolong).

D. Bantuan Pangan Non Tunai

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong (toko, agen). Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Dengan adanya program BPNT dapat membantu untuk mendapatkan cukup pangan serta nutrisi yang lebih seimbang tanpa kendala sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin secara merata.

E. Tujuan BPNT

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

F. Syarat Penerima BPNT

Persyaratan Yang wajib dipenuhi oleh calon penerima BPNT adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia

- Termasuk kedalam masyarakat Kurang Mampu atau miskin
- Harus tercatat Dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial
- Bukan PNS,TNI, atau POLRI

G. Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan atau bantuan sosial dan berada di dalam panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

3. Asesmen

Asesmen dilakukan oleh praktikan menggunakan Metode wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Selaku KPendamping BPNT Kelurahan Rancanumpang.

a. Identifikasi Masalah

Program BPNT merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Dimana Para penerima Manfaat akan diberikan Kartu yang akan diisi saldo setiap bulannya lalu, KPM dapat menukar dengan Bahan Pangan di E- Warong terdekat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh praktikan di lapangan, Terdapat 83 Penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Rancanumpang. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Ramram selaku pendamping BPNT di Kelurahan Rancanumpang Terdapat beberapa keluhan warga dikarenakan pada saat seharusnya bantuan cair, Masih terdapat KPM yang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saldonya masih Nol atau Bantuan belum cair. Bahkan, ada beberapa KPM yang mengeluhkan bantuannya tidak cair selama 1 Tahun namun masih memenuhi syarat untuk menjadi penerima BPNT namun, KPM tidak mengetahui penyebab kenapa bantuannya tidak cair padahal masih memenuhi syarat sebagai KPM dan memasuki waktu cairnya bantuan.

Hal ini menyebabkan KPM yang KKSnya mengalami saldo nol pada saat bantuan seharusnya cair, menjadi terpaksa tidak menerima bantuan hal ini juga membuat kebutuhan KPM yang seharusnya dapat dipenuhi melalui BPNT juga jadi tidak terpenuhi.

1) Penyebab Masalah

- **Status Pekerjaan pada KTP/KK yang membuat KPM dianggap sebagai golongan mampu.**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ramram selaku pendamping BPNT, beliau mengatakan bahwa terjadinya saldo nol ini disebabkan oleh status pekerjaan salah satu anggota keluarga yang akhirnya dapat dianggap sebagai golongan mampu oleh system sehingga bantuan di stop. Beberapa kasus yang terjadi di Kelurahan Rancanumpang adalah dalam 1 Kartu Keluarga terdapat anggota keluarga yang status pekerjaannya sebagai pegawai swasta dimana salah satu syarat penerima BPNT adalah Warga yang rentan atau miskin.

- **Perbedaan data pada KTP/KK dengan data yang ada di Bank**

Para penerima harus memperhatikan hal-hal rinci pada penulisan nama, seperti perbedaan titik, koma, gelar dan lain sebagainya. Karena, perbedaan kecil akan membuat data Penerima dianggap berbeda dan dianggap tidak sesuai sehingga Bank tidak dapat mencairkan Bantuannya.

- **Ketidaktahuan KPM terkait penyebab KKS mengalami Saldo Nol**

Masih Banyak Penerima Manfaat yang tidak mengetahui mengapa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saldonya masih nol walaupun sudah memasuki waktu bantuan tersebut cair, sehingga kasus seperti ini terjadi lebih dari 1 KPM karena ketidaktahuan KPM terkait penyebab dan belum dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

2) Dampak Masalah

- **KPM tidak mendapatkan bantuan**

Karena KKS mengalami saldo nol, KPM tidak dapat mengambil bantuan yang seharusnya didapatkan karena KKS yang dimiliki KPM tidak memiliki saldo.

- **Kebutuhan KPM tidak dapat terpenuhi**

Akibat tidak cairnya bantuan KPM pada bulan yang seharusnya bantuan ini cair namun, tidak cair karena saldo nol membuat kebutuhan KPM yang seharusnya dipenuhi melalui bantuan pangan non tunai tapi KPM tidak mendapatkannya.

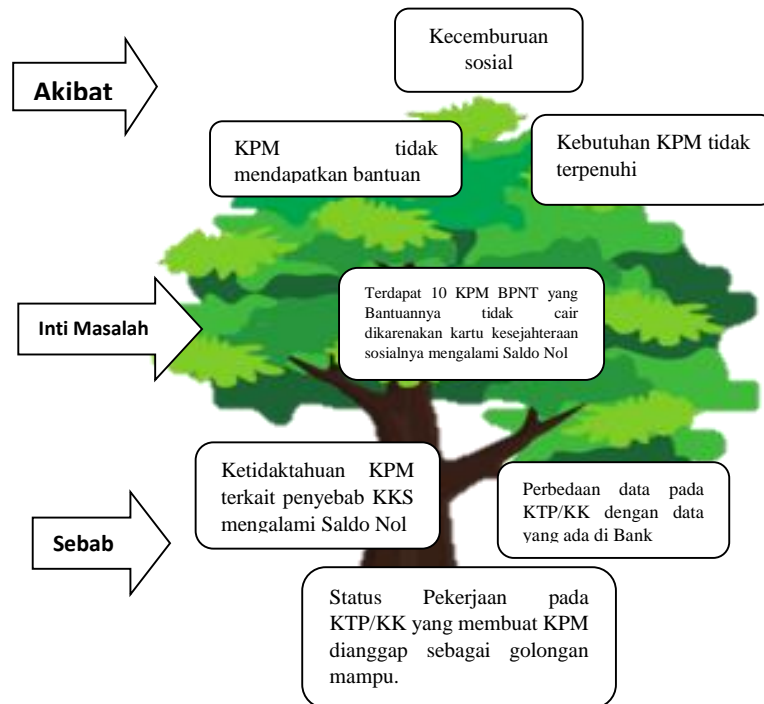
- **Akan muncul Kecemburuan Sosial**

KPM yang mengalami tidak cairnya bantuan akibat saldo nol dalam jangka waktu yang lama, pasti akan merasa cemburu melihat

KPM yang lain mendapatkan bantuan namun beberapa KPM yang terkena saldo nol tidak mendapatkan.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan identifikasi diatas Praktikan mengambil focus masalah “Terdapat 10 KPM BPNT yang Bantuannya tidak cair dikarenakan kartu kesejahteraan sosialnya mengalami Saldo Nol “



Gambar 2.3 Analisis Pohon masalah profil analisis sumber dana bantuan sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Rancanumpang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data serta ketidaktahuan KPM terkait dengan penyebab terjadinya masalah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan terkait Bantuan yang tidak cair dikarenakan saldo nol, maka dibutuhkan peningkatan pengetahuan yang sasarannya ditujukan kepada seluruh KPM BPNT terkait akar masalah dari tidak cairnya bantuan ini serta penanganan terkait permasalahan yang terjadi.

c. Identifikasi potensi dan sumber

Potensi dan sumber yang berada di wilayah Kelurahan Rancanumpang:

- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
- Pekerja Sosial
- pekerja sosial masyarakat
- pengurus karang taruna
- pendamping sosial program Bantuan Pangan Non Tunai

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Program BPNT merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Dimana Para penerima Manfaat akan diberikan Kartu yang akan diisi saldo setiap bulannya lalu, KPM dapat menukar dengan Bahan Pangan di E- Warong terdekat.

Namun, dalam pelaksanaannya BPNT masi memiliki beberapa permasalahan yaitu Ada beberapa KPM yang bantuannya belum cair, setelah diteliti ternyata penyebabnya ada pada data yang tidak sesuai. Masalah ini sebenarnya dapat di selesaikan. Tetapi, karena KPM tidak mengetahui penyebab terjadinya saldo nol yang menyebabkan bantuannya tidak cair sehingga ada KPM yang sampai 1 Tahun bantuannya tidak cair. Oleh karena itu, praktikan mengambil isu ini dengan rencana intervensi yaitu **Sosialisasi penanganan Saldo Kosong**

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Program Peningkatan Pengetahuan KPM terkait penyebab dan penanganan saldo nol adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang apa saja yang harus dilakukan jika KKS mengalami saldo nol yang berdampak pada Tidak cairnya bantuan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program Peningkatan Pengetahuan KPM terkait penyebab dan penanganan saldo nol adalah sebagai berikut

- Memberikan informasi kepada penerima Manfaat mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini.
- Memberikan informasi kepada penerima manfaat apa yang harus dilakukan jika mengalami permasalahan terkait saldo nol.

c. Bentuk kegiatan dan Program

Untuk Menangani permasalahan terkait saldo nol yang menyebabkan tidak cairnya bantuan sehingga kebutuhan KPM tidak dapat terpenuhi dapat dilakukan melalui program peningkatan pengetahuan KPM terkait dengan penanganan saldo nol.

- **Sosialisasi penanganan Saldo Kosong**

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya Sosialisasi adalah agar Masyarakat di Kelurahan Rancanumpang dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan jika BPNT tidak cair walaupun masih memenuhi syarat menjadi KPM.

Tabel 2.6 Bentuk Kegiatan Profil analisis sumber dana bantuan sosial

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
1.	Sosialisasi penanganan Saldo Kosong	Peningkatan Pengetahuan KPM terkait penyebab dan penanganan saldo nol adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang apa saja yang harus dilakukan jika KKS mengalami saldo nol yang berdampak pada Tidak cairnya bantuan.	Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Rancanumpang	Pekerja Sosial	1 Hari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penanganan Saldo kosong yang menyebabkan bantuan tidak cair sesuai dengan waktu yang ditentukan

d. Sistem Partisipan

Dalam program peningkatan pengetahuan KPM terkait dengan penanganan saldo nol, terdapat system partisipan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sistem Partisipan Sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator system	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	KPM BPNT Kelurahan Rancanumpang
4.	Support System	1. Dinas Sosial 2. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
5.	Controlling System	Pendamping BPNT
6.	Implementing System	5. Pekerja Sosial 6. Pekerja sosial masyarakat
7.	Target System	KPM BPNT Kelurahan Rancanumpang
8.	Action System	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan adalah Community Organization atau pengorganisasian masyarakat yaitu proses untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan. Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

- **Penyuluhan Sosial**

Penyuluhan sosial adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan perubahan cara-cara penanganan masalah kesejahteraan sosial, demi tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial individu keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Penyuluhan sosial sebagai proses Pendidikan (edukasi, yaitu suatu sistem Pendidikan nonformal untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berbudaya agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Pada pelaksanaan program peningkatan pengetahuan KPM terkait dengan penanganan saldo nol, terdapat Rencana anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk jalannya program tersebut. Maka dibentuk Rencana anggaran biaya sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rencana Anggaran Biaya profil analisis sumber dana bantuan sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	5	pack	50.000,00	250.000,00
	Sound System	2	Unit	125.000,00	250.000,00
	Banner kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
	Tali Raffia	2	Roll	10.000,00	10.000,00
	Infokus	1	Unit	100.000,00	100.000,00
	Layar Proyektor	1	Unit	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				785.000,00
2.	Honorarium				
	Narasumber	1	Orang/Jam	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	20	Box	10.000,00	200.000,00
	Snack panitia	10	Box	10.000,00	100.000,00
	Snack narasumber	1	Box	10.000,00	10.000,00
	Jumlah III				310.000,00
	Jumlah Keseluruhan				2.095.000,00

2) Alat Yang Dibutuhkan

Alat-Alat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya program peningkatan pengetahuan KPM terkait dengan penanganan saldo nol adalah sebagai berikut:

- Meja
- Kursi
- Laptop
- Banner
- Proyektor
- Alat tulis
- Sound system

g. Analisis kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.9 Analisis Kelayakan Program Profil Analisis sumber dana bantuan sosial

Analisis SWOT	Strength (Kekuatan) : 1. Narasumber yang memberikan materi merupakan narasumber yang sesuai dengan permasalahan 2. Adanya dukungan dari TKSK	Weakness (Kelemahan) : Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan
Opportunities (Peluang) : 1. Kegiatan ini dapat menyelesaikan permasalahan bantuan yang tidak cair karena mengalami saldo nol 2. Kebutuhan KPM dapat terpenuhi kembali	Strategi SO : Meningkatkan Pemahaman KPM agar lebih memperhatikan data data yang berkaitan dengan csirnya bantuan).	Strategi WO : Penyuluhan dilakukan menggunakan Bahasa Yang mudah di pahami dan intonasi yang menyesuaikan peserta
Threats (Ancaman) : Peserta Lansia kesulitan dalam melakuakan kegiatan ini	Strategi ST : Memberikan kesempatan terhadap KPM yang mengalami kesulitan dan akan dibantu selama penyuluhan ini berlangsung	Strategi WT : Melakukan moneva

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal kegiatan

Tabel 2.10 Jadwal kegiatan Profil Analis pengelolaan sumber dana bantuan sosial

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.30 – 08.45	15 Menit	MC
4.	Sambutan	08.45 – 09.00	15 Menit	Pihak Kelurahan
5.	Pembacaan Do'a	09.00 – 09.10	10 Menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai pentingnya keikutsertaan Masyarakat dalam Jaminan Hari Tua dan Manfaat dari jaminan Hari Tua	09.10 – 10.40	90 Menit	BPJS Ketenagakerjaan
7.	Sesi tanya Jawab	10.40 – 11.00	20 Menit	Peserta
8.	Dokumentasi	11.00 – 11.15	15 Menit	Panitia
9.	Penutupan	11.15 – 11.20	5 Menit	MC

2) Langkah-Langkah

- **Pra Pelaksanaan**

Pada Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan dalam tahap pertama. Praktikan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program. Langkah pertama yaitu membentuk panitia kegiatan untuk membentuk koordinasi. Yang kedua penyusunan rancangan yang

berisi pengisi kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk dimasukkan kedalam proposal. Yang ketiga melakukan penyusunan laporan untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Lalu mempersiapkan kebutuhan untuk kegiatan dan yang terakhir menghubungi pihak terkait.

- **Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan KPM dalam penanganan saldo nol terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. **Pemaparan Materi**

Materi yang disampaikan disini berkaitan dengan penyebab serta cara penanganan bantuan tidak cair akibat saldo nol

- **Pasca Pelaksanaan**

- 1) **Evaluasi**

Evaluasi disini bertujuan untuk menilai apakah dalam pelaksanaannya terdapat hambatan atau kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki untuk kedepannya.

C. Profil Pemberdayaan Sosial

1. **Gambaran Umum Masalah**

Dalam Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa peran dan fungsi koperasi adalah (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya, (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Binangkit Rancanumpang merupakan koperasi simpan pinjam aktif yang di dalamnya terdapat oleh 86 orang yang terdiri dari 5 pengelola koperasi, 4 kader PKK, dan 77 Warga masyarakat. Agar dapat mengembangkan koperasi menjadi koperasi yang maju maka dibutuhkan inovasi atau ide-ide baru mengenai keberlanjutan koperasi tersebut. Dengan

jumlah anggota yang cukup banyak sangat diharapkan akan muncul inovasi yang dapat mengembangkan koperasi binangkit rancanumpang. Namun, Regenerasi pengurus di koperasi binangkit Rancanumpang masih kurang baik karena tidak adanya pergantian pengurus koperasi Binangkit

Pemberdayaan (empowerment) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat/ individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.

Koperasi sangat memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi memiliki peran untuk membantu anggotanya mendapatkan penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya koperasi dalam mensejahterakan anggotanya adalah dengan cara meningkatkan perekonomian anggota koperasi itu sendiri. Karena, selain berfungsi untuk melakukan simpan pinjam koperasi memiliki tugas yaitu adalah meningkatkan perekonomian di koperasi tersebut sehingga dana yang ada dapat mengalami penambahan.

Namun, Koperasi binangkit rancanumpang sendiri belum memiliki usaha yang dapat meningkatkan system ekonomi di koperasi tersebut sehingga sejauh ini koperasi binangkit masih hanya sebatas koperasi yang hanya melakukan simpan pinjam.

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a. Konsep Pemberdayaan

a) Pengertian

Edi Suharto (2005) Mengatakan Bahwa Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dipaparkan di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangudaya dan memperkuat kekuasaan kelompok lemah dengan cara mendorong, memotivasi dan menyadarkan masyarakat mengenai potensi yang dimiliki sehingga upaya yang akan dilakukan dalam mengembangkan masyarakat dapat sesuai dengan tujuan.

2) Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2014:202), ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

- Perbaikan kelembagaan (better institution) Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- Perbaikan usaha (better business) Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnistas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- Perbaikan pendapatan (better income) Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- Perbaikan lingkungan (better environment) Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- Perbaikan kehidupan (better living) Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- Perbaikan masyarakat (better community) Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sedangkan menurut Sulistiyani (2004) Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Berdasarkan pernyataan mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakat melalui berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

3) Aspek Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (1997), dalam suatu pemberdayaan sedikitnya ada tiga aspek yang diantaranya :

- a) Pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang mampu untuk mengembangkan segala potensi masyarakat.
- b) Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi tentang modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan mutu kehidupannya.
- c) Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah serta melindungi berbagai bentuk intimidasi yang mengentaskan ketertindasan dalam berbagai sendi kehidupan.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek :

- Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
- Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, pelayanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberadaannya sangat kurang.

- Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementasan, pembudayaan, dan pengamatan demokrasi (Friedmann, 1994).

Berdasarkan pernyataan mengenai aspek pemberdayaan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam upaya pemberdayaan terdapat beberapa aspek yang masing-masing aspeknya sama-sama bertujuan untuk melindungi, menguatkan, serta menciptakan sebuah suasana yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

4) Bentuk Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

- a) Identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan
- b) Penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi
- c) Pelatihan keterampilan
- d) Penguatan kelembagaan dalam masyarakat
- e) Pendampingan
- f) Kemitraan dan penggalangan dana
- g) Pemberian akses terhadap stimulant modal, peralatan usaha dan tempat usaha
- h) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- i) Supervise dan advokasi sosial
- j) Penguatan keserasian sosial dan/atau
- k) Bimbingan lanjut

b. Konsep Koperasi

1) Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.27, (2015:27.3)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan serta dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama yang dilandasi dengan prinsip koperasi.

2) Tujuan

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

3) Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.25 1992, prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan bersifat demokratis.
- c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota
- d) Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
- e) Kemandirian.
- f) Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian.
- g) Kerjasama antarkoperasi.
- h) Kepedulian terhadap masyarakat.

3. Asesmen

Asesmen dilakukan oleh praktikan menggunakan Metode wawancara dan Observasi. Wawancara dilakukan dengan Ibu Yuniar selaku ketua Koperas Binangkit dan ibu Solihati selaku sekretaris koperasi Binangkit.

a. Identifikasi Masalah

Pentingnya Pemberdayaan dan Perlindungan Bagi Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran

yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Koperasi sangat memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi memiliki peran untuk membantu anggotanya mendapatkan penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya koperasi dalam mensejahterakan anggotanya adalah dengan cara meningkatkan perekonomian anggota koperasi itu sendiri. Karena, selain berfungsi untuk melakukan simpan pinjam koperasi memiliki tugas yaitu adalah meningkatkan perekonomian di koperasi tersebut sehingga dana yang ada dapat mengalami penambahan.

Oleh karena itu, koperasi sebaiknya membuat usaha untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan ekonomi anggota. Usaha yang diharapkan ada adalah usaha dalam sektor rill bisnis. Namun, dikelurahan Rancanumpang sendiri koperasi belum memiliki usaha untuk peningkatan ekonomi anggotanya.

1) Penyebab masalah

- **Kurangnya pemahaman anggota terkait regulasi koperasi dan pentingnya koperasi bagi perekonomian anggota.**

Anggota koperasi belum paham terkait dengan peran koperasi yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui kegiatan usaha.

- **Minimnya dukungan anggota terhadap aktivitas koperasi**

Dukungan anggota terhadap aktivitas koperasi menjadi sangat penting, karena tanpa adanya dukungan dari anggota maka wadah koperasi tidak dapat menjalankan perannya bagi anggotanya

2) Dampak Masalah

- **Kurangnya partisipasi masyarakat dalam keanggotaan koperasi**

Minimnya Kegiatan Usaha Masyarakat yang didasari oleh kemampuan koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggotanya

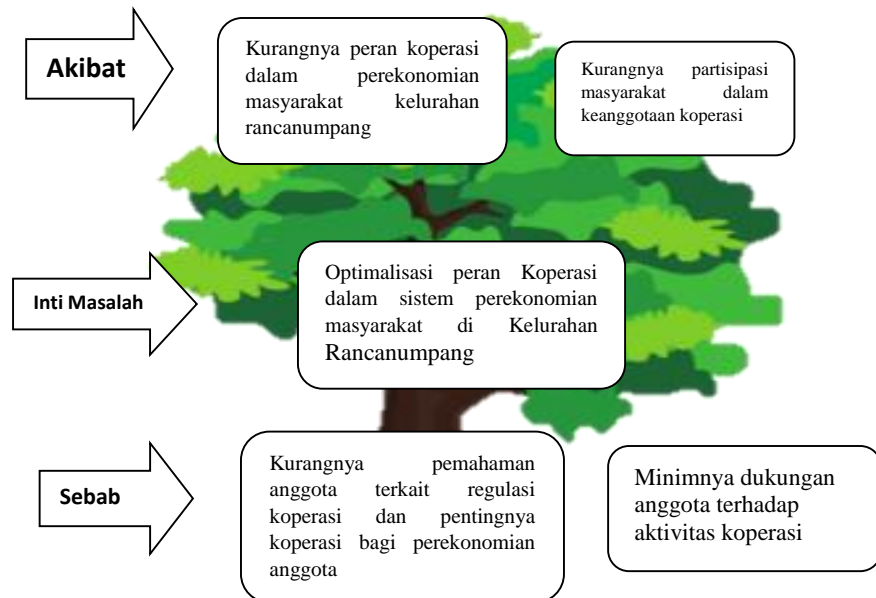
- **Kurangnya peran koperasi dalam perekonomian masyarakat kelurahan rancanumpang.**

Koperasi memiliki peran untuk membantu anggotanya mendapatkan penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, koperasi sebaiknya

membuat usaha untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan ekonomi anggota. Namun, dikelurahan Rancanumpang sendiri koperasi belum memiliki usaha untuk peningkatan ekonomi anggotanya

3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan identifikasi diatas Praktikan mengambil fokus masalah Optimalisasi peran Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat di Kelurahan Rancanumpang.



Gambar 2.4 Analisis Pohon masalah profil Pemberdayaan sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan permasalahan yang ada terkait dengan peran koperasi maka dibutuhkan optimalisasi peran koperas dalam system perekonomian sehingga peran koperasi yang sudah baik akan menjadi semakin baik dan dibutuhkan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam hal mengelola keuangan koperasi sehingga dapat terbentuknya usaha sektor rill bisnis.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

- **Pengurus koperasi**

Pengurus koperasi disini dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang akan menjalankan program ini bersama dengan anggota koperasi.

- **Pekerja sosial**

Pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu yang ada. Dengan menyadarkan badan/lembaga bahwa ada permasalahan yang terjadi di Kelurahan Rancanumpang.

- **Anggota Koperasi**

Anggota koperasi disini sebagai seseorang yang menerima program yang akan diberikan, anggota koperasi yang akan menjalankan program ini karena program ini memang diperuntukkan untuk mereka

- **Dinas Koperasi UMKM**

Dinas koperasi UMKM dapat dimanfaatkan sebagai pendukung jalannya program, Dinas koperasi dapat mendukung program ini salah satunya dengan pemberian masukan demi kelancaran program.

4. Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Untuk meningkatkan perekonomian anggota, koperasi diharapkan membuat sebuah usaha dalam sektor rill bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian anggota koperasi.

Karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, membuat usaha merupakan salah satu Upaya agar anggota sejahtera melalui system perekonomian. Namun, Koperasi di Kelurahan Rancanumpang belum mempunyai usaha. Jadi, koperasi hanya membantu mensejahterakan anggotanya melalui simpan pinjam saja.

Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman anggota terkait regulasi yang di koperasi anggota terkait regulasi dan pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggota serta dalam mensejahterakan anggotanya, Selain anggota, pengurus koperasi juga harus mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pengelolaan usaha dan keuangan koperasi sehingga pada saat usaha sektor rill ini dibuat usaha ini akan dapat terus berjalan karena pengurus koperasi yang telah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan akan menggerakkan anggota koperasi dalam melakukan usaha ini.oleh karena itu praktikan mengambil isu ini agar nantinya dapat memberikan pemahaman serta memberikan edukasi kepada pengurus terkait dengan cara mengelola usaha dan keuangan.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Memecahkan permasalahan yang terjadi di koperasi terkait dengan optimalisasi peran koperasi dalam sistem perekonomian

2) Tujuan Khusus

- a) Mendorong dan memotivasi pengurus serta anggota koperas agar terbentuknya Usaha dalam sektor riil bisnis
- b) Meningkatkan pemahaman tentang manajemen Koperasi bagi pengurus
- c) Meningkatkan kapasitas pengurus dalam hal pengelolaan Koperasi

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Untuk menangani permasalahan kurangnya peran koperasi dalam perekonomian anggota dapat dilakukan melalui Program peningkatan Kapasitas pengurus dan anggota koperas terkait dengan optimalisasi peran koperasi dalam perekonomian anggota.

- **Sosialisasi manajemen keuangan koperasi dan peran koperasi.**

sosialisasi disini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan usaha dan keuangan, yang paling penting pengurus Koperasi termotivasi untuk membuat unit usaha sektor riil koperasi serta memberikan anggota koperasi pemahaman mengenai pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian.

Tabel 2.11 Bentuk kegiatan Program peningkatan Kapasitas pengurus dan anggota koperas

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
1.	Sosialisasi manajemen keuangan koperasi dan peran koperasi.	Memberi pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan koperasi dan pentingnya peran koperasi	Anggota dan pengurus koperasi binangkait	Pekerja Sosial Dinas Koperasi	1 Hari	Pengurus dan anggota memahami pentingnya peran koperasi dalam perekonomian anggota dan paham tentang bagaimana mengelola usaha dan keuangan dalam koperasi

d. Sistem Partisipan

Dalam pelaksanaan Program peningkatan Kapasitas pengurus dan anggota koperas terkait dengan optimalisasi peran koperasi dalam perekonomian anggota. Terdapat system partisipan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Sistem Partisipan profil analis pemberdayaan sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator system	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	1. Anggota Koperasi 2. Pengurus Koperasi
4.	Support System	Dinas Koperasi UMKM
5.	Controlling System	Dinas Koperasi UMKM
6.	Implementing System	Pekerja Sosial Pengurus Koperasi
7.	Target System	Anggota Koperasi Pengurus Koperasi
8.	Action System	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan adalah Community Organization atau pengorganisasian masyarakat yaitu proses untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan juga menggunakan teknik FGD (*Focus Group Discussion*). Teknik ini bertujuan untuk pencapaian diskusi dan dilakukan dalam kegiatan perencanaan upaya Pengembangan koperasi menjadi lembaga bisnis terdepan di kelurahan rancanumpang.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan terlaksananya program. Rencana anggaran biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Renacana Anggaran Biaya Profil analis pemberdayaan sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	50.000	100.000
	Tali Raffia	3	Buah	5.000	15.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Infocus	1	Unit	150.000	150.000
	Jumlah I				340.000
2.	Honorarium				
	Narasumber Dinas Koperasi UMKM	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000
	Jumlah II				1.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	30	Box	5.000	150.000
	Snack panitia	8	Box	10.000	80.000
	Snack narasumber	1	Box	20.000	20.000
	Jumlah III				250.000
	Jumlah Keseluruhan				1.590.000

2) Alat yang dibutuhkan

Alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini adalah:

- ATK
- Banner
- Tali raffia

- Laptop
- LCD & Proyektor
- Mikrofon
- Kursi
- Meja
- Sound System

g. Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.14 Analisis SWOT Profil analis pemberdayaan sosial

Aspek SWOT	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan Dinas Koperasi UMKM dalam membantu memberi pemahaman terhadap anggota 2. Dapat meningkatkan Perekonomian anggota 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>Anggota Koperasi tidak mengikuti kegiatan dengan baik</p>
<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikannya kiat-kiat agar usaha yang dibuat dapat terus berjalan • Adanya dukungan dari Dinas Koperasi UMKM • Narasumber oleh ahli 	<p>Strategi SO</p> <p>Anggota melakukan usaha berdasarkan dengan ilmu yang telah diberikan sehingga usaha dapat berjalan</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Melakukan monitoring pada saat pelaksanaan kegiatan</p>
<p>Ancaman (Threats)</p> <p>Antusias anggota kurang</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Melakukan pendampingan terhadap usaha yang dibuat oleh koperasi</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Memberikan informasi terkait pentingnya peran koperasi ini untuk anggota dan keuntungannya</p>

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1. Jadwal Kegiatan

Tabel 2.15 Jadwal Kegiatan Profil analisis pemberdayaan sosial

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.30 – 08.45	15 Menit	MC
4.	Sambutan	08.45 – 09.00	15 Menit	Piha kelurahan
5.	Pembacaan Do'a	09.00 – 09.10	10 Menit	Panitia
6.	Penyuluhan sosial terkait regulasi dan pentingnya peran koperasi	09.10 – 10.40	90 Menit	Pengurus koperasi
7.	Sesi tanya Jawab	10.40 – 11.00	20 Menit	Peserta
8.	Pembentukan kelompok usaha	11.00 – 12.00	60 menit	Pekerja sosial dan peserta
9.	Dokumentasi	12.00 – 12.05	5 Menit	Panitia
10.	Penutupan	12.05 – 12.10	5 Menit	MC

2. Langkah-langkah

• Pra Pelaksanaan

Pada Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan dalam tahap pertama. Praktikan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program. Langkah pertama yaitu membentuk panitia kegiatan untuk membentuk koordinasi. Yang kedua penyusunan rancangan yang

berisi pengisi kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk dimasukkan kedalam proposal. Yang ketiga melakukan penyusunan laporan untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Lalu mempersiapkan kebutuhan untuk kegiatan dan yang terakhir menghubungi pihak terkait.

- **Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan Pengembangan koperasi menjadi lembaga bisnis terdepan di kelurahan rancanumpang terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) **Sosialisasi**

sosialisasi disini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan usaha dan keuangan, yang paling penting pengurus Koperasi termotivasi untuk membuat unit usaha sektor riil koperasi serta memberikan anggota koperasi pemahaman mengenai pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian.

- **Pasca Pelaksanaan**

- a) **Evaluasi**

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Air merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi umat manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Ketersediaan air yang ada di bumi sangat berlimpah, tetapi air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber air bersih sangat terbatas. Kebutuhan manusia akan air bersih terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan semakin beragamnya aktifitas manusia yang membutuhkan air

bersih. Meskipun jumlah air yang ada di bumi tetap, jumlah air bersih yang dapat digunakan semakin berkurang karena adanya berbagai permasalahan lingkungan antara lain terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, bencana alam, perubahan iklim serta berbagai faktor lainnya. Berbagai hal tersebut menyebabkan manusia semakin mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. Semakin terbatasnya jumlah air bersih yang dapat digunakan menjadi salah satu penyebab makin rendahnya pelayanan air bersih bagi masyarakat terutama masyarakat di daerah yang minim akan sumber dan akses air bersih

Permasalahan air bersih ini terjadi di Kelurahan Rancanumpang, permasalahan air ini bisa terjadi karena adanya pembangunan perumahan dan proyek di wilayah Kelurahan Rancanumpang. Beberapa RW di Rancanumpang mengalami permasalahan air yaitu Airnya berwarna kuning. Hal ini terjadi karena banyaknya galian sumur akibat pembangunan proyek atau perumahan yang kapasitas kedalamannya berbeda-beda sehingga membuat beberapa wilayah di Kelurahan Rancanumpang saluran air yang keluar dari sumur hanya sedikit.

Selain itu, Pembangunan yang ada di wilayah Rancanumpang juga berdampak pada kualitas air yang pada awalnya bening bahkan, airnya dapat langsung diminum tanpa harus dimasak namun, semenjak adanya pembangunan ditambah dengan Banjir yang dalam waktu lama merendam beberapa wilayah di Rancanumpang membuat air disana menjadi keruh dan berbau.

Permasalahan air keruh yang terjadi di Kelurahan Rancanumpang ini berdampak buruk untuk kesehatan karena jika air ini sampai masuk ke dalam tubuh manusia, dapat mengakibatkan diare. Lalu, air yang tidak bersih juga berpotensi merusak lingkungan. Karena dampak yang disebabkan oleh permasalahan air ini bias menjadi sangat serius apabila tidak ditangani maka dari itu, praktikan tertarik untuk mengambil isu ini.

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a. Konsep tentang Penataan Lingkungan

Menurut Rohe (2009), Penataan lingkungan didefinisikan sebagai suatu kegiatan mendesain lingkungan baru atau mendesain pembangunan kembali (revitalisasi) lingkungan yang lama. Sedangkan menurut Checkoway (1985) penataan lingkungan didefinisikan tidak hanya berupa pengembangan fisik tetapi juga pengembangan layanan sosial pada tingkat lingkungan. Penataan lingkungan juga merupakan suatu proses masyarakat mengembangkan rencana, program, atau layanan sosial pada

tingkat lingkungan ketetanggan (neighborhood). Penataan lingkungan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi suatu kota, salah satunya adalah masalah kriminalitas (Rohe, 2009). Pada tingkat yang paling mendasar, penataan lingkungan melibatkan publik, organisasi non profit, dan usaha-usaha pihak swasta dalam perencanaan yang fokus pada karakter fisik satu atau lebih lingkungan, namun itu didefinisikan pada tingkat lokal (Rohe, 2009).

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.

b. Konsep Air

1) Definisi

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan dan minum serta aktivitas sehari-hari lainnya. Air yang berkualitas baik adalah air yang memenuhi baku mutu air minum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV2010, meliputi persyaratan fisika, kimia, dan mikrobiologi. Air harus terbebas dari segala macam mikroorganisme yang pathogen maupun apatogen dan bahan kimia berbahaya lainnya.

2) Sumber Air

Sumber air dapat berasal dari air permukaan, yaitu air sungai, dan danau. Air tanah yang dilihat berdasarkan kedalamannya dapat disebut dengan air tanah dangkal. Air angkasa adalah air yang berasal dari atmosfer, misalnya hujan dan salju. Kualitas berbagai sumber air berbeda-beda tergantung dengan kondisi alam serta permukaan dapat berkualitas baik bila tanah sekitar tidak tercemar, oleh karena itu air permukaan dan air tanah dangkal sangat bervariasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Sumber air dibagi menjadi 4 kelompok, yakni air permukaan, air tanah, air hujan dan mata air.

c. Konsep Air Bersih

1) Definisi Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri.

d. Konsep Lingkungan Sosial

1) Definisi Lingkungan social

Lingkungan sosial atau masyarakat adalah untuk mencapai keberhasilan belajar lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman dan memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi.

2) Ciri-ciri Lingkungan Sosial

- (a) Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab
- (b) Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya
- (c) Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. Jenis Lingkungan Sosial

- 1) Primer Lingkungan sosial primer sejatinya terdapat hubungan sosial yang terjalin erat antara anggota satu dengan anggota lain, terjalin suatu hubungan saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain.
- 2) Sekunder Lingkungan sosial jenis ini di dalamnya terjalin suatu hubungan anggota satu dengan anggota lainnya secara agak longgar, tidak begitu intens, serta hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal maupun aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu keempat yaitu penataan lingkungan sosial dilakukan pada tanggal 22 Maret- 1 April 2023. praktikan memilih isu terkait permasalahan air bersih di Kelurahan Rancanumpang, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Susi selaku ketua RW 01. Kemudian praktikan menggunakan data

sekunder melalui internet seperti portal berita Tribun, Kompas, dan juga melalui jurnal. Teknologi asesmen yang digunakan dengan analisis pohon masalah. Analisa pohon masalah adalah suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisa pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir dengan lebih terstruktur.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Hasil wawancara dengan narasumber, beliau mengatakan kondisi air di Kelurahan Rancanumpang Khususnya di RW 01 pada awalnya bersih bahkan Air tersebut dapat langsung di Minum. Namun, semenjak adanya pembangunan proyek Gelora Bandung Lautan Api dan Pembangunan Summarecon Bandung membuat kualitas air di wilayah Rancanumpang berubah menjadi keruh. Banyaknya titik penggalian sumur menjadi salah satu penyebab air keruh. Korelasi dari Pembangunan terhadap cadangan air bersih yaitu pada penyempitan ruang resapan air yang disebabkan karena pembangunan kurang memperhatikan aspek ekologis suatu wilayah.

Pembangunan ini memberikan dampak yaitu air yang keruh, dan air keruh ini menjadi permasalahan karena ini menyangkut dengan masalah kesehatan serta juga bias merusak lingkungan apabila permasalahan ini tidak diselesaikan

1) Penyebab Masalah

- **Adanya Pembangunan di wilayah pemukiman**

Pembangunan memiliki dampak terhadap cadangan air tanah di suatu wilayah. Banyaknya titik penggalian sumur menjadi salah satu penyebab air keruh. Korelasi dari Pembangunan terhadap cadangan air bersih yaitu pada penyempitan ruang resapan air yang disebabkan karena pembangunan kurang memperhatikan aspek ekologis suatu wilayah.

- **Banjir yang terlalu lama merendam wilayah pemukiman**

Banjir mengandung partikel lumpur, apabila wilayah tersebut terendam banjir dalam waktu yang lama maka partikel lumpur ini akan mengendap sehingga berpengaruh terhadap kualitas air.

2) Dampak Masalah

- **Resiko terkena penyakit diare**

Kualitas air yang tidak bersih dapat membuat Masyarakat menjadi rentan terkena penyakit apabila air yang tidak bersih ini

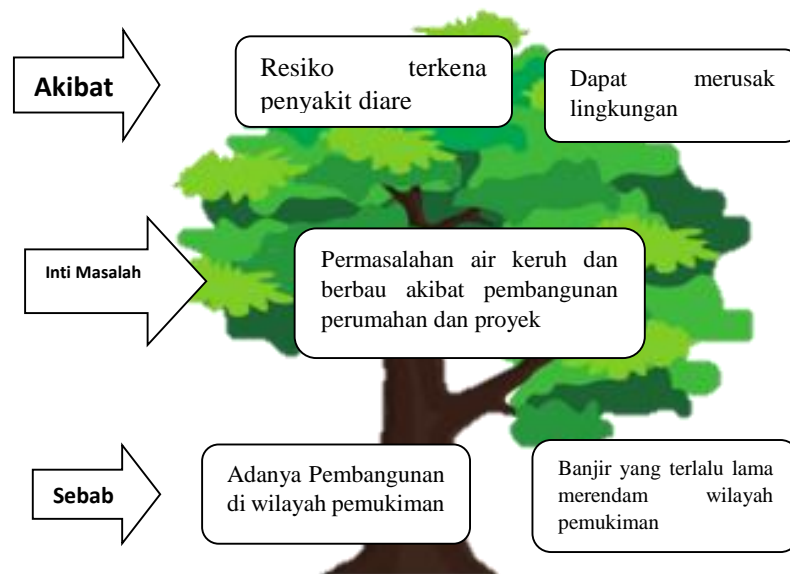
sampai masuk kedalam tubuh manusia itu dapat menyebabkan diare.

- **Dapat Merusak Lingkungan**

Di dalam air yang keruh, terdapat zat-zat yang seharusnya zat tersebut tidak ada didalam air. Zat-zat yang ada di dalam air keruh ini jika mengenai tanaman dapat merusak tanaman yang akhirnya membuat lingkungan menjadi tidak asri.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Dari Latar Belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil Fokus Masalah yaitu. Permasalahan air keruh dan berbau akibat pembangunan perumahan dan proyek



Gambar 2.5 Analisis Pohon masalah profil analisis penataan lingkungan

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan Permasalahan Air bersih yang dialami oleh Beberapa masyarakat di Kelurahan Rancanumpang maka masyarakat

membutuhkan sebuah upaya penjernihan air untuk membantu masyarakat agar tetap dapat menggunakan air yang bersih walaupun berasal dari sumur yang sama.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

- **Masyarakat Kelurahan Rancanumpang**

Masyarakat Kelurahan Rancanumpang yang dimaksud adalah orang-orang yang merasakan langsung kendala air di lingkungan Kelurahan Rancanumpang. Masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sistem sumber dan pendukung program-program yang ada dalam penanganan masalah air di Kelurahan Rancanumpang.

- **Stakeholder terkait**

Para Stakeholder terkait yang terdiri dari instansi-instansi yang ikut serta membantu pemecahan masalah air di kelurahan Rancanumpang. Para Stakeholder tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendukung, baik itu mendukung pelaksanaan program-program dalam bentuk anggaran maupun pendukung dalam pemberian masukan untuk perencanaan program-program yang bertujuan untuk pemecahan masalah air di Kelurahan Rancanumpang.

- **PDAM kota bandung**

Pengelola PDAM kota bandung yang berperan sebagai pengelola pendistribusian air di kelurahan rancanumpang. Pengelola PDAM di kota bandung dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam pelaksanaan program.

- **Pihak Kelurahan**

Pihak Kelurahan berperan sebagai pemberi wewenang, Pihak kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang dapat mendukung jalannya program

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pembangunan yang terjadi di wilayah rancanumpang membuat beberapa masyarakat mengalami permasalahan yaitu saluran air yang berubah menjadi keruh dan berbau. menurut UU No.17 pasal 6 tahun 2019 tentang Sumber daya air, menyebutkan bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.” sehingga air

bersih merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Itu artinya masyarakat yang mengalami permasalahan air kotor belum bias memenuhi kebutuhan pokoknya.

Air yang kotor berdampak buruk pada kesehatan masyarakat terlebih lagi pada balita. Di kelurahan Rancanumpang sendiri seringkali ditemukan ada yang berjualan air namun apabila masyarakat harus membeli air terus menerus akan mengeluarkan uang yang dik cukup besar. Kondisi air keruh di beberapa RW di Rancanumpang memang tidak sama ada yang selalu keruh dan ada air yang awalnya keruh ketika ditunggu sekitar 3-4 jam akan menjadi bening. Namun, hal ini cukup memakan waktu jika harus menunggu lebih dari 1 jam setiap harinya.

Pada kenyataannya masyarakat belum menemukan alternatif penyelesaian sehingga praktikan mengangkat isu terkait Permasalahan air keruh dan berbau akibat pembangunan perumahan dan proyek

Rencana intervensi yang akan digunakan ialah dengan melakukan program peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan masalah air keruh dan berbau.

b. Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Untuk memecahkan permasalahan air keruh dan berbau akibat pembangunan perumahan dan proyek.

2) Tujuan Khusus

- (a) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat cara melakukan penjernihan air
- (b) Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana membuat alat penjernih.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Untuk menangani permasalahan air keruh dan berbau dapat dilakukan melalui program peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan masalah air keruh dan berbau. Program ini memuat beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana

Sosialisasi ini bertujuan Untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait dengan cara melakukan penjernihan air dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi. Sehingga masyarakat dapat menemukan solusi atas masalah air ini.

2) Simulasi pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana

Setelah masyarakat mendapatkan materi terkait cara penjernihan air, masyarakat juga akan diberikan simulasi sehingga informasi yang didapat lebih maksimal karena diperagakan secara langsung.

Tabel 2.16 Bentuk kegiatan profil analisis penataan lingkungan

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
1.	Sosialisasi pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana	memberikan pengetahuan masyarakat terkait dengan cara melakukan penjernihan air	Masyarakat Kelurahan Rancanumpang	Pekerja Sosial PDA M Kota Bandung	1 Hari	Terbentuknya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya air bersih dan cara melakukan penjernihan
2.	Simulasi pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana	Mempraktikkan secara langsung kepada masyarakat tata cara melakukan penjernihan air			1 hari	Masyarakat dapat melakukan penjernihan air

d. Sistem Partisipan

Dalam pelaksanaan program peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan masalah air keruh dan berbau. Terdapat system partisipan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Sistem Partisipan profil analisis penataan Lingkungan

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator system	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	PDAM Kota Bandung
3.	Client System	Masyarakat
4.	Support System	PDAM Kota Bandung
5.	Controlling System	Kelurahan Rancanumpang
6.	Implementing System	7. Pekerja Sosial 8. Masyarakat 9. PDAM Kota Bandung
7.	Target System	Masyarakat
8.	Action System	1. Pekerja Sosial 2. PDAM Kota Bandung

e. Metode dan Teknis

Metode yang digunakan adalah Community Organization atau pengorganisasian masyarakat yaitu proses untuk mengembangkan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali berbagai persoalan yang berada di lingkungan masyarakat dengan melihat permasalahan dan potensi untuk melakukan intervensi ke arah yang lebih baik. Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan. Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan perubahan cara-cara penanganan masalah kesejahteraan sosial, demi tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial individu keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Penyuluhan sosial sebagai proses Pendidikan (edukasi, yaitu suatu sistem Pendidikan nonformal untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan terlaksananya program. Rencana anggaran biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rencana Anggaran Biaya profil analisis penataan lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	50.000	100.000
	Tali Raffia	3	Buah	5.000	15.000
	Banner Kegiatan	1	Lembar	75.000	75.000
	Infocus	1	Unit	150.000	150.000
	Jumlah I				340.000
2.	Honorarium				
	Narasumber PDAM Kota Bandung	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000
	Jumlah II				1.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	50	Box	5.000	250.000
	Snack panitia	10	Box	10.000	100.000
	Snack narasumber	1	Box	20.000	20.000
	Jumlah III				370.000
	Jumlah Keseluruhan				1.710.000

2) Alat Yang dibutuhkan

Alat-Alat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya program ini adalah:

- ATK
- Banner
- Tali raffia
- Laptop
- LCD & Proyektor
- Mikrofon
- Kursi
- Meja
- Sound System

g. Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2. 19 Analisis SWOT PrProfil analis penataan Lingkungan sosial

Aspek SWOT	<p>Kekuatan (Strenght)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait cara penjernihan air • Melibatkan stakeholder terkait 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>Masyarakat belum tentu dapat langsung memahami materi.</p>
<p>Peluang (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan 2.Materi diberikan oleh orang yang tepat terkait permasalahan 3.Simulasi dilakukan oleh ahli 	<p>Strategi SO</p> <p>Mengoptimalkan program penjernihan air berbasis masyarakat</p>	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan 2.Menyusun proposal untuk diajukan kepada stakeholder
<p>Ancaman (Threats)</p> <p>Masyarakat mungkin akan merasa bosan</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Mengadakan ice breaking di sela sela kegiatan</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Melakukan kegiatan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dengan nada yang tidak terlalu cepat serta dalam pembawaan materi menggunakan komunikasi dua arah</p>

h. Jadwal dan Langkah-langkah
1. Jadwal Kegiatan

Tabel 2.20 Jadwal Kegiatan profil analis Penataan Lingkungan

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana na
1.	Persiapan Kegiatan	07.30 – 08.00	30 Menit	Panitia
2.	Registrasi Peserta	08.00 – 08.30	30 Menit	Panitia
3.	Pembukaan	08.30 – 08.45	15 Menit	MC
4.	Sambutan	08.45 – 09.00	15 Menit	Pihak keluraha n
5.	Pembacaan Do'a	09.00 – 09.10	10 Menit	Panitia
6.	Pemaparan materi mengenai program penjernihan Air	09.10 – 10.40	90 Menit	PDAM Kota Bandung
7.	Sesi tanya Jawab	10.40 – 11.00	20 Menit	Peserta
8.	Simulasi Pembuatan alat penjernihan dan cara melakukan penjernihan	11.00- 13.00	120 Menit	PDAM Kota Bandung
8.	Dokumentasi	13.00 – 13.10	10 Menit	Panitia
9.	Penutupan	13.10 – 13.15	5 Menit	MC

2. Langkah-langkah

a) Pra Pelaksanaan

Pada Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan dalam tahap pertama. Praktikan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program. Langkah pertama yaitu membentuk panitia kegiatan untuk membentuk koordinasi. Yang kedua penyusunan rancangan yang berisi pengisi kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, serta

alat dan bahan yang dibutuhkan untuk dimasukkan kedalam proposal. Yang ketiga melakukan penyusunan laporan untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Lalu mempersiapkan kebutuhan untuk kegiatan dan yang terakhir menghubungi pihak terkait.

b) Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program penjernihan air berbasis masyarakatterdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Sosialisasi pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana

Untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait dengan cara melakukan penjernihan air dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi. Sehingga masyarakat dapat menemukan solusi atas masalah air ini.

2) Simulasi cara pengelolaan air dengan system penyaringan sederhana

Setelah masyarakat mendapatkan materi terkait cara penjernihan air, masyarakat juga akan diberikan simulasi sehingga informasi yang didapat lebih maksimal karena diperagakan secara langsung.

c) Pasca Pelaksanaan

1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan refleksi atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan. Tujuan dilakukannya evaluasi proses adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Evaluasi hasil merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan atau program. Tujuan dilakukannya evaluasi hasil adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan setelah pelaksanaan program.

E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Peneliti utama pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi (PBMBG), Badan Geologi, Kementrian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa kawasan bandung selatan, terutama gedebage dan sekitarnya akan masuk zona merah atau daerah paling rawan terdampak jika patahan lembang bergerak. Patahan Lembang merupakan retakan sepanjang 29 km melintang dari timur ke barat di utara Kota Bandung (Daryono, 2016). Hasil kajian Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa laju pergeseran patahan Lembang mencapai 5,0 mm/tahun (BMKG, 2017). Pengamatan geodetik membuktikan bahwa patahan Lembang adalah patahan aktif (Meilano et al., 2012). Patahan ini pernah bergerak dalam 10.000 tahun terakhir (Keller & Pinter, 1996 dalam Maipark, 2015). Gempa besar berkekuatan di atas 6 skala Richter belum pernah tercatat di kawasan patahan Lembang. Namun, gempa berkekuatan 3 skala richter terjadi pada tahun 1834, 1879, 1910, 2003, dan 2011.

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang sulit untuk diprediksi kapan, dimana, berapa besar kekuatannya, sehingga sering menimbulkan kejutan dan kepanikan di tengah masyarakat, bahkan sering menimbulkan kerugian, baik jiwa maupun harta benda. Kesiapsiagaan merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana alam untuk secara cepat dan efektif merespon keadaan/situasi pada saat dan setelah bencana. Upaya ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurangi risiko/dampak bencana alam, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. apabila terjadi gempa dengan kekuatan di atas 5 skala Richter dapat menyebabkan terjadinya guncangan di permukaan bumi dan menggoyang benda-benda di atasnya seperti rumah/bangunan, perabotan rumah, tiang listrik, pohon dan sebagainya. Benda-benda yang tidak kuat menahan guncangan tersebut akan rubuh dan tumbang/jatuh, yang kemudian dapat menimpa orang yang berada dibawah atau didekatnya.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah di sekitar patahan Lembang tersebut perlu memahami tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya yang berada di wilayah tersebut, terutama yang berada di wilayah rawan bencana gempa bumi. tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, umumnya tindakan yang berkaitan dengan responden berada di rumah ketika terjadi gempa, seperti berlindung di tempat aman, melindungi kepala, menjauhi benda- benda tergantung, menjauhi jendela/dinding kaca dan memungkinkan

segera menuju lapangan terbuka. Tindakan ini tidak hanya di rumah, tetapi juga di dalam gedung, mobil atau kereta api dan tinggal di daerah pantai atau perbukitan ketika terjadi gempa bumi. Tindakan ini yang ditambahkan tersebut disesuaikan dengan buku saku tanggap tangkas tangguh menghadapi bencana dari BNPB tahun 2017.

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan yang dipilih

a. Tinjauan Konsep Bencana

Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Bencana alam juga dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi, tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia (kehilangan nyawa) dan segala produk budi dayanya (kepemilikan, harta, dan benda), kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan manusia. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu, dengan ketidakberdayaan". Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992), bencana ialah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respons dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007, Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerudakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan

manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, bencana dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu :

- 1) **Bencana Alam**, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, angin topan, kebakaran liar, dan lain sebagainya.
- 2) **Bencana non-Alam**, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam seperti wabah penyakit, epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan lain sebagainya.
- 3) **Bencana Sosial**, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa oleh manusia seperti seperti terorisme, kerusuhan, eksodus, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, dan lain sebagainya. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

(a) Bencana alam geologis

Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang beraalah dari dalam bumi (gaya endogen). Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

(b) Bencana alam klimatologis

Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh factor angin dan hujan. Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran alami hutan (bukan oleh manusia) Gerakan tanah longsor termasuk juga bencana alam, walaupun pemicu utamanya adalah factor klimatologis (hujan), tetapi gejala awalnya dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik tanah serta bantuan dan sejenisnya).

(c) Bencana alam ekstra-terrestrial

Bencana alam ekstra-terrestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, contohnya hantaman/impact meteor. Bila hantaman benda benda langit mengenai permukaan bumi maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi.

b. Landasan Hukum Penanggulangan Bencana

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 3) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kontingen Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 145 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Alam Untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Non Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.
- 5) Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 6) Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 7) Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten.

c. Tinjauan Konsep Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

- 1) Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami sangat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai.
- 2) Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup. Atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau bandang.
- 3) Gunung Meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih,

sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif.

- 4) Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor dapat di sebut juga sebagai peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Longsor kerap terjadi saat hujan, meski tak selalu. Selain itu, longsor umumnya terjadi di area dengan lereng yang curam.
- 5) Gempa Bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi).
- 6) Angin Topan merupakan angin yang berhembus dengan kekuatan kencang atau sangat kuat. Angin topan terjadi di daerah yang mempunyai iklim tropis. Angin topan berwujud pusaran angin yang kencang dengan kecepatan angin sekitar 120 km/ jam atau lebih, bahkan di level tertingginya kecepatan angin topan mencapai hingga 250 km per jamnya.
- 7) Kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada.

Gempa bumi adalah guncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat lulus lantak apa yang ada di permukaan bumi. Rumah, gedung, jembatan, taman, dan lain sebagainya dapat hancur rata dengan tanah jika terkena gempa bumi yang besar.

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya menapai pada keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km.

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi. Siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 periode, yaitu:

- (a) Prabencana: pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium.
- (b) Bencana: pada saat kejadian/ krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting.
- (c) Pascabencana: pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana.

d. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU 24/2007). Misalnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontinjensi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana.

3. Asesmen

Dalam kegiatan Assesmen yang dilakukan oleh praktikan Metode yang digunakan praktikan adalah melakukan wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam memperdalam pengetahuan dan memperkuat hasil analisis praktikan juga mempelajari dari materi serta informasi mengenai kebencanaan melalui pembekalan praktikum dan mata kuliah kebencanaan.

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan rancanumpang adalah salah satu wilayah di Kecamatan Gedebage. Kecamatan Gedebage merupakan salah satu daerah yang harus waspada terhadap pergeseran sesar lembang. Karena, Dampak yang dihasilkan oleh sesar lembang bukan hal yang kecil melainkan hal yang membuat kerugian besar misalnya kehilangan nyawa, kerusakan bangunan, dan lain-lain.

Dalam upaya mengantisipasi resiko gempa bumi masyarakat diharapkan dapat melakukan sebuah langkah yang tepat apabila dihadapkan oleh sebuah bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Ibu Susi selaku Ketua RW 01. Beliau mengatakan warga RW 01 di Kelurahan Rancanumpang pada saat terjadi gempa mereka saling memanggil tetangganya untuk keluar dari rumah. Namun, di Kelurahan Rancanumpang sendiri belum ada kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar lembang. Sehingga Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar lembang ini masih kurang.

Di Rancanumpang sendiri belum ditemukan ada plang informasi kebencanaan yang terpasang di sekitar Kelurahan Rancanumpang. Padahal, itu merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Apabila, gempa bumi terjadi maka masyarakat tahu kemana mereka pergi karena informasi yang ditunjukkan oleh papan informasi tersebut.

1) Penyebab Masalah

- **Belum adanya penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi.**

Belum adanya penyuluhan ini membuat masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesiapsiagaan gempa bumi yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya dan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat gempa terjadi.

- **Belum tersedianya sarana dan prasarana mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi**

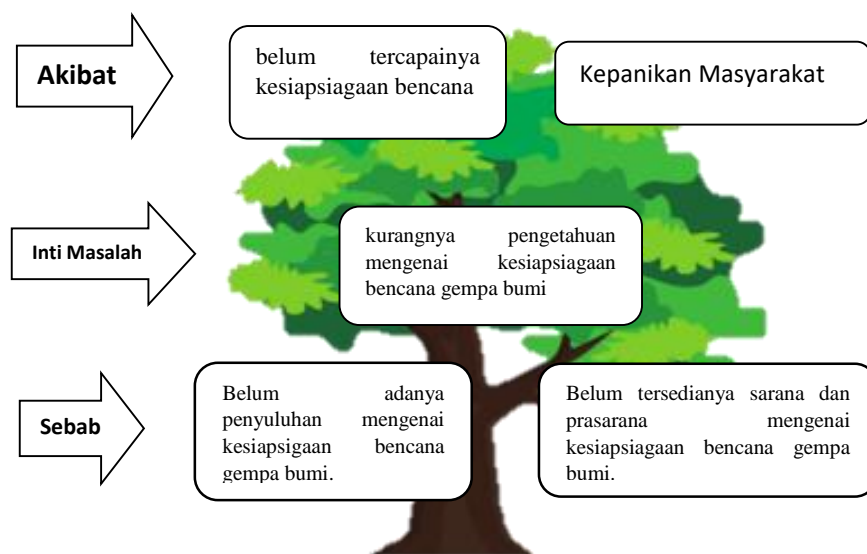
Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah mengenai penyediaan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi dan papan titik kumpul

2) Dampak Masalah

Dampak permasalahan dari kurangnya pengetahuan mengakibatkan belum tercapainya kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat secara menyeluruh. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dan menjadi kunci utama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang bisa saja terjadi dalam sewaktu-waktu. Pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi juga kepada sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rentan terhadap bencana alam.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi dari hasil asesmen, praktikan menentukan masalah yaitu masyarakat kurang pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya kepanikan yang dirasakan masyarakat karena minimnya pengetahuan akan kesiapsiagaan bencana.



Gambar 2.6 Analisis Pohon Masalah profil analisis penanggulangan bencana

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah terkait dengan penanggulangan bencana, maka membutuhkan sosialisasi untuk memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi patahan lembang kepada masyarakat Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage untuk meningkatkan upaya pengetahuan masyarakat mengenai bencana.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

- Karang Taruna
Karang taruna sebagai sasaran pemberian pengetahuan mengenai kebencanaan serta kelompok dari sadar bencana.

- **Taruna Siaga Bencana (TAGANA)**
TAGANA sebagai sistem sumber yang dilibatkan untuk kegiatan program pengurangan risiko bencana dan Kecamatan Parongpong bertanggung jawab untuk memberi kegiatan sosialisasi tanggap darurat bencana alam.
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**
BPBD sebagai stakeholder utama dalam program penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kelurahan Rancanumpang khususnya di Kecamatan Gedebage. Dan memberi kegiatan sosialisasi mengenai gempa bumi yang berasal dari patahan lembang.
- **Dinas Sosial Kota Bandung**
Tugas Dinas Sosial Kota Bandung yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial. Dalam pelaksanaan risiko bencana alam, Dinas Sosial Kota Bandung membentuk suatu kelompok relawan yang bertugas untuk menyadarkan masyarakat Kota Bandung akan bahayanya segala potensi bencana.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, begitu pula dengan gempa bumi yang berdampak dari sesar lembang. Maka dari itu, untuk mengantisipasi masyarakat harus mengetahui langkah apa yang tepat dilakukan pada saat bencana itu terjadi.

Berdasarkan hasil asesmen, diketahui terdapat permasalahan yaitu beberapa masyarakat kurang pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang disebabkan dari sesar Lembang, penyebab dari permasalahan ini adalah karena Belum adanya penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi.

Terdapat potensi seperti sarana prasarana, tim kebencanaan seperti TAGANA, karang taruna, beberapa stakeholders dan pendukung lainnya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan intervensi untuk mengatasi permasalahan di Kelurahan Rancanumpang. Masyarakat Kelurahan Rancanumpang membutuhkan pelatihan dan berfokus pada kesiapsiagaan, walaupun di kelurahan Rancanumpang belum pernah terjadi gempa namun melihat dampak yang akan muncul akibat pergeseran sesar lembang membuat masyarakat untuk memiliki kesiapsiagaan bencana gempa bumi.

b. Tujuan umum dan khusus

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program Upaya Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Patahan Lembang di Kelurahan Rancanumpang adalah untuk membentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi yang dimana Kecamatan Gedebage termasuk wilayah paling rawan terdampak oleh Patahan/Sesar Lembang

2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam kesiapsiagaan bencana patahan Lembang
- Mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Untuk menangani permasalahan penanggulangan bencana yang berfokus pada kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan Bencana gempa bumi yang Disebabkan oleh Sesar Lembang

1. Edukasi kesiapsiagaan bencana

Dalam meningkatkan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana, dapat dilakukan dengan memberi sosialisasi dan memberikan gambaran terhadap warga dilakukan simulasi pelatihan, kegiatan ini berupa demonstrasi atau drama dalam persiapan penyelamatan diri yang akan dilakukan oleh pihak terkait yang ahli dalam bidang kesiapsiagaan bencana

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan Bencana yang Disebabkan oleh Sesar Lembang. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah mengenai penyediaan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi dan papan titik kumpul.

Tabel 2.21 Bentuk kegiatan Profil analis penanggulangan bencana

No	Bentuk Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
1.	Edukasi kesiapsiagaan bencana	meningkatkan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Kelurahan Rancunmpang Kecamatan Gedebage 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja Sosial BPBD 	1 Hari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Mengadakan sarana dan prasarana untuk selalu siaga dalam hal pertolongan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan pada saat bencana datang.	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Kelurahan Rancunmpang Kecamatan Gedebage 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kecamatan Gedebage Dinas Sosial 	1 Hari	Terpasangnya papan informasi terkait kebencanaan

d. Sistem Partisipan

Dalam Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan Bencana gempa bumi yang Disebabkan oleh Sesar Lembang, terdapat system partisipan sebagai berikut:

Tabel 2.22 Sistem Partisipan profil Analisis Penanggulangan bencana

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator system	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	1. TAGANA 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Client System	1. Masyarakat 2. Karang Taruna
4.	Support System	Dinas Sosial
5.	Controlling System	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Implementing System	1. Karang Taruna 2. Masyarakat 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. TAGANA
7.	Target System	1. Masyarakat 2. Karang Taruna
8.	Action System	1. Pekerja Sosial 2. Masyarakat 3. Karang Taruna 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. TAGANA

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan oleh praktikan selama pelaksanaan intervensi terhadap permasalahan yang ada yaitu *Community Development*. Kemudian diimplementasikan dengan menggunakan strategi kolaborasi dan kampanye. Strategi kolaborasi dapat terlaksana apabila sistem menyetujui dengan perubahan yang diusulkan dapat diterima oleh partisipan atau sumber pihak penting (stakeholder) yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga menggunakan teknik FGD (*Focus Group Discussion*). Teknik ini bertujuan untuk pencapaian

diskusi dan dilakukan dalam kegiatan perencanaan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi dari patahan Lembang. Strategi dan teknik yang akan digunakan adalah *collaboration dan campaign* dengan cara memberikan edukasi dan implementasi. Edukasi dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana serta melakukan simulasi pelatihan sedangkan implementasi dilakukan melalui penetapan dan pemasangan plang rawan bencana, petunjuk jalur evakuasi, dan petunjuk titik kumpul pada saat bencana gempa bumi.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan terlaksananya program. Rencana anggaran biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Rencana anggaran Biaya profil analisis penanggulangan bencana

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	50.000	100.000
	Tali Raffia	3	Buah	5.000	15.000
	Banner Kegiatan	2	Lembar	75.000	150.000
	Papan Petunjuk Jalur Evakuasi	100	Unit	150.000	15.000.000
	Papan Titik kumpul	100	Unit	200.000	20.000.000
	Jumlah I				35.265.000
2.	Honorarium				
	Narasumber BPBD Jawa Barat	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Narasumber TAGANA	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000
	Narasumber Dinas Sosial	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000
	Jumlah II				3.000.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	60	Box	5.000	300.000
	Snack panitia	15	Box	10.000	150.000
	Snack narasumber	3	Box	20.000	60.000
	Jumlah III				510.000
	Jumlah Keseluruhan				38.775.000

2) Alat Yang dibutuhkan

Alat-Alat yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya program ini adalah:

- ATK
- Banner
- Tali raffia
- Laptop
- LCD & Proyektor
- Mikrofon
- Kursi
- Meja
- Sound System

g. Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman

(threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.24 Analisis SWOT Profil analisis penanggulangan Bencana

Aspek SWOT	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana • Melibatkan stakeholder terkait 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>Anggaran biaya yang besar</p>
<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya panduan pengelolaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana • Adanya dukungan dari stakeholder terkait • Narasumber oleh ahli • Pelatihan dilakukan oleh ahli 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan program dan kerjasama dengan para stakeholder terkait • Kegiatan akan berjalan dengan baik karena ada dukungan dari stakeholder 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan 3. Menyusun proposal untuk diajukan kepada stakeholder
<p>Ancaman (Threats)</p> <p>Jumlah sasaran yang cukup besar</p>	<p>Strategi ST</p> <p>monitoring terkait pelaksanaan</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Menyusun proposal dan mencantumkan anggaran yang akan dikeluarkan untuk diajukan agar kegiatan terlaksana</p>

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Pra Pelaksanaan

Pada Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan dalam tahap pertama. Praktikan mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program. Langkah pertama yaitu membentuk panitia kegiatan untuk membentuk koordinasi. Yang kedua penyusunan rancangan yang berisi pengisi kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, serta alat dan bahan yang dibutuhkan

untuk dimasukkan kedalam proposal. Yang ketiga melakukan penyusunan laporan untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan. Lalu mempersiapkan kebutuhan untuk kegiatan dan yang terakhir menghubungi pihak terkait.

2) Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan Bencana gempa bumi yang Disebabkan oleh Sesar Lembang terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

(a) Sosialisasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan sesar lembang.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan sesar lembang ini akan melibatkan TAGANA dan BPBD sebagai pemateri. Kegiatan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi memiliki sasaran yaitu seluruh masyarakat di kelurahan Rancanumpang. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini akan dilaksanakan di Kantor BPBD Jawa Barat

Tabel 2.25 Jadwal Kegiatan profil analis penanggulangan bencana

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
1.	Persiapan Kegiatan	08.30 – 09.00	30 Menit	Panitia
2.	Pembukaan	09.00 – 09.15	15 Menit	MC
3.	Sambutan	09.15 – 09.30	15 Menit	BPBD
4.	Pembacaan Do'a	09.30 – 09.40	10 Menit	Panitia
5.	Pemaparan materi mengenai kesiapsiagaan bencana	08.40 – 09.40	60 Menit	BPBD
6.	Tanya Jawab	09.40 – 10.10	30 Menit	Peserta

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi	Pelaksana
7.	Praktik kesiapsiagaan bencana	10.10 – 11.10	60 Menit	TAGANA
8.	Dokumentasi	11.10 – 11.25	15 Menit	Panitia
9.	Penutupan	11.25 – 11.30	5 Menit	MC

(b) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksud salah satunya adalah dengan memasang petunjuk arah jalur evakuasi bencana. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun proposal pengajuan sarana dan prasaran kebencanaan bersama BPBD Jawa Barat.

3) Pasca Pelaksanaan

Dalam program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat mengenai kesiapsiagaan Bencana gempa bumi yang Disebabkan oleh Sesar Lembang'' yang telah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya melakukan evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan dan tingkat pencapaian selama proses pelaksanaan program, lalu pembuatan laporan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial praktikan mengikuti proses yang telah terlaksana yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Sosial. Dari kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dengan pengumpulan data melalui wawancara maupun data sekunder. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan saat mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Proses kegiatan Praktikum Laboratorium ini secara garis besar berhasil menambah wawasan bagi para praktikan, karena ketika proses praktikum berlangsung para praktikan mengikuti kegiatan pembekalan dari masing-masing narasumber sehingga menambah wawasan serta pengetahuan praktikan baik di dalam lingkup peluang kerja maupun informasi mengenai 5 (lima) profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Melalui adanya kegiatan pembekalan dari narasumber tersebut, tentu mampu memberikan motivasi lebih bagi para praktikan serta menambah rasa optimisme untuk menghadapi tantangan dunia kerja kedepannya tentunya di dalam bidang Pekerjaan Sosial. Selain itu praktikan juga mampu mengasah keterampilan di dalam menyusun rencana intervensi pekerjaan sosial sesuai dengan issue yang sedang berkembang di masyarakat.

Berikut hasil analisis praktikan terhadap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

1. Analisis Jaminan Sosial

Dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan memilih isu mengenai Minimnya kepesertaan Jaminan Hari tua pada pekerja sektor informal. Permasalahan ini disebabkan karena masyarakat yang tidak mengetahui terkait kepesertaan JHT yang ternyata dapat diikuti oleh pekerja pada sektor informal, serta belum adanya sosialisasi mengenai manfaat dari JHT. Hal ini berdampak pada para pekerja informal yang akan memasuki masa tidak lagi produktif yaitu tidak adanya jaminan hari tua apabila pekerja informal sudah memasuki usia lansia. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program peningkatan pengetahuan manfaat dan kepesertaan JHT.

2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan memilih isu mengenai BPNT yang bantuannya tidak cair dikarenakan saldo KKS mengalami saldo nol. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan data pada KTP atau KK dengan data yang ada di DTKS, hal ini menyebabkan beberapa KPM tidak dapat menerima bantuan walaupun masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. KPM juga tidak mengetahui penanganan apa yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui kegiatan sosialisasi mengenai Penanganan saldo nol

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan memilih isu mengenai optimalisasi peran koperasi dalam system perekonomian anggota. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya pemahaman anggota terkait regulasi koperasi dan pentingnya koperasi bagi perekonomian anggota, Minimnya dukungan anggota terhadap aktivitas koperasi.. Pada dasarnya koperasi berperan untuk mensejahterakan anggotanya, salah satu bentuk mensejahterakan anggota koperasi adalah dengan meningkatkan perekonomiannya, namun koperasi di kelurahan rancunumpang koperasi hanya menjadi wadah simpan pinjam sedangkan dibutuhkan sebuah usaha dimana usaha ini dapat membantu anggota koperasi untuk meningkatkan perekonomian anggotanya. Karena Minimnya Kegiatan Usaha Masyarakat yang didasari oleh kemampuan koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggotanya menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keanggotaan koperasi. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi yaitu membangun kesadaran dan memberi pemahaman anggota koperasi terkait regulasi dan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian anggota.

4. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Dalam profil analisis penataan lingkungan sosial, praktikan memilih isu mengenai permasalahan air berbau dan keruh yang diakibatkan oleh pembangunan perumahan dan proyek Selain disebabkan karena pembangunan permasalahan ini juga diakibatkan karena banjir yang menggenang dalam waktu yang cukup lama Permasalahan Permasalahan air keruh ini berdampak pada kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit salah satunya diare.. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui kegiatan penyuluhan sosial terkait pentingnya air bersih dan cara melakukan penjernihan air.

5. Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan memilih isu mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Kelurahan Rancanumpang merupakan salah satu daerah yang menjadi daerah paling rawan jika sesar lembang mengalami pergerakan. Namun, belum ada bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan di kelurahan rancanumpang salah satunya seperti papan jalur evakuasi dan lain-lain. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan gempa bumi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah diikuti oleh praktikan terkait fokus 5 (lima) profil yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada :

1. Rekomendasi bagi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

- a. Diharapkan kedepannya untuk pemilihan tempat praktikum dapat lebih memperhatikan akomodasi mahasiswa yang mungkin tidak memiliki kendaraan karena berasal dari luar daerah, sehingga prodi dapat memilih tempat yang tidak terlalu jauh dari dago karena belum tentu juga di tempat praktikum dapat menemukan rumah tinggal sementara sedangkan untuk pulang pergi cukup memakan waktu dan cukup melelahkan jika dilakukan selama 4 hari dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu.
- b. Diharapkan para tim dosen dapat menyesuaikan waktu apabila memberikan kelas pengganti dikarenakan terkadang mahasiswa juga memiliki kegiatan yang harus dilakukan di tempat praktikum.

2. Rekomendasi bagi Politenik Kesejahteraan Sosial :

Dalam kegiatan praktikum memperhatikan mengenai mekanisme perizinan di lokasi wilayah praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

BPJS Ketenagakerjaan - Jaminan Hari Tua (JHT). (n.d.). Gajimu.com. Retrieved April 29, 2023, from https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/copy_of_jaminan-hari-tua

Rosdiyani, T. (2020, April). *EDUKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI. Volume 2*, No. 1.

Optimalisasi peran koperasi TNI AU dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga :: Studi di Koperasi Mabasau Cilangkap. (n.d.). ETD UGM. Retrieved April 29, 2023, from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/46652>

Penanganan Bencana. (n.d.). BPBD Provinsi NTB. Retrieved April 29, 2023, from <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/penanganan-bencana>

Peran Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia - Mekari Jurnal. (n.d.). Jurnal.id. Retrieved April 29, 2023, from <https://www.jurnal.id/id/blog/peran-koperasi-dalam-perekonomian-di-indonesia/>

Retrieved April 29, 2023, from <http://water.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/7.-Permenkes-no-492-thn-2010-ttg-persyaratan-kualitas-air-minum.pdf>

Sadar Yuni Raharjo, M. T. A. (n.d.). *Kajian Tingkat Pelayanan Air Bersih Terhadap Pengembangan Kawasan Pelayanan Baru Di Kecamatan Gedebage Kota Bandung*.

PERMENSOS NOMOR 20 Tahun 2019

Arifandy, F. P. (2020). *PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN: PERSPEKTIF MODAL KERJA*, vol 3(No 1). 10.22219/jaa.v3i1.11665

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT refika Aditama.

Pincus, A., & Minahan, A. (1973). *Social work practice: Model and method*. FE Peacock Publishers.

Brager, G., Specht, H., & Torczyner, J. (1987). *Community organizing*. Columbia University Press

LAMPIRAN

KAMIS, 17 FEBRUARI 2023
DI KELURAHAN RANCAUMBANG
POLITEKNIK KESEHATAN SOSIAL
ARSENSI COMMUNITY MEETING

No	Nama	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan
1	114 PABRINA	PANCAMURAH RT010	[Signature]
2	KELI AMELIA	PANCAMURAH RT010	[Signature]
3	ALYAN PATRICIA	PANCAMURAH RT010	[Signature]
4	IBU JAS	PANCAMURAH RT010	[Signature]
5	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
6	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
7	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
8	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
9	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
10	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
11	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
12	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
13	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
14	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
15	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
16	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
17	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
18	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
19	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
20	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
21	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
22	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
23	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]
24	YUDHA NIKHIL	PANCAMURAH RT010	[Signature]

80	2.000	10/20/19	
79	2.000	10/20/19	
78	2.000		
77	2.000		
76	2.000		
75	2.000	10/20/19	
74	2.000	10/20/19	
73	2.000	10/20/19	
72	2.000	10/20/19	
71	2.000	10/20/19	
70	2.000	10/20/19	
69	2.000	10/20/19	
68	2.000	10/20/19	
67	2.000	10/20/19	
66	2.000	10/20/19	
65	2.000	10/20/19	
64	2.000	10/20/19	
63	2.000	10/20/19	
62	2.000	10/20/19	
61	2.000	10/20/19	
60	2.000	10/20/19	
59	2.000	10/20/19	
58	2.000	10/20/19	
57	2.000	10/20/19	
56	2.000	10/20/19	
55	2.000	10/20/19	
54	2.000	10/20/19	
53	2.000	10/20/19	
52	2.000	10/20/19	
51	2.000	10/20/19	
50	2.000	10/20/19	
49	2.000	10/20/19	
48	2.000	10/20/19	
47	2.000	10/20/19	
46	2.000	10/20/19	
45	2.000	10/20/19	
44	2.000	10/20/19	
43	2.000	10/20/19	
42	2.000	10/20/19	
41	2.000	10/20/19	
40	2.000	10/20/19	
39	2.000	10/20/19	
38	2.000	10/20/19	
37	2.000	10/20/19	
36	2.000	10/20/19	
35	2.000	10/20/19	
34	2.000	10/20/19	
33	2.000	10/20/19	
32	2.000	10/20/19	
31	2.000	10/20/19	
30	2.000	10/20/19	
29	2.000	10/20/19	
28	2.000	10/20/19	
27	2.000	10/20/19	
26	2.000	10/20/19	
25	2.000	10/20/19	
24	2.000	10/20/19	
23	2.000	10/20/19	
22	2.000	10/20/19	
21	2.000	10/20/19	
20	2.000	10/20/19	
19	2.000	10/20/19	
18	2.000	10/20/19	
17	2.000	10/20/19	
16	2.000	10/20/19	
15	2.000	10/20/19	
14	2.000	10/20/19	
13	2.000	10/20/19	
12	2.000	10/20/19	
11	2.000	10/20/19	
10	2.000	10/20/19	
9	2.000	10/20/19	
8	2.000	10/20/19	
7	2.000	10/20/19	
6	2.000	10/20/19	
5	2.000	10/20/19	
4	2.000	10/20/19	
3	2.000	10/20/19	
2	2.000	10/20/19	
1	2.000	10/20/19	

DAFTAR HADIR COMMUNITY MEETING

NO	BANK	ID Pengurus	PENERIMA ID	NMPENGURUS	NIK
1	9	3421262	YAYAH RATNASARI		3273275807820003
2	9	3421247	EPON		3273274407660004
3	9	3421245	ANIL		3273276004720001
4	9	67385740	CACIH		3273276105560002
5	9	3421253	NENG RITA		3273275107810003
6	9	67380553	AJANG ANWAR		3273271304910003
7	9	93246	EFRI ZANOPA		3273275504730002
8	9	87771	NANI SUMARNI		3273274608720003
9	9	118591300	TATI HARYATI		3273274206580002
10	9	67196341	MULYANAH		3273276305710001
11	9	67208269	ELA		3273274311450001
12	9	3421263	ANIS		3273275506760020
13	9	67250213	NANDA ABDUL ROHMAN		3273270208940001
14	9	3421258	NETI HERAYATI		3273274907790001
15	9	3421270	LENA SUSILAWATI		3273276801840004
16	9	67196348	EMEH		3273276309580001
17	9	67183958	SITI SADIHA		3273275709760002
18	9	67385789	WINA NURJANAH		3273276312890001
19	9	67196852	NENTI SUHAETI		3273276512650002
20	9	67208542	TATI		3273274510650002
21	9	67195921	AI IDAS		3273276006760003
22	9	67385754	ENTIN KARTINI		3273276111620002
23	9	3421257	ICIT		3273274309450003
24	9	67221436	NENENG KOMARA		3204055502650002
25	9	67385187	UNAH WASWATI		3273274504780002
26	9	118591279	NUR AISAH		3273275007670002
27	9	3421259	IMAS SUMINAR		3204105005890001
28	9	69331110	YETI SUMIATI		3273274302730005
29	9	67220960	NEULIS EHA		3273274807880002
30	9	67195886	UJUN		3273276005560001
31	9	67208234	ATIN		3273274308690004
32	9	67196362	HURRIYAH BALAFIF		3273276312760001
33	9	67183160	ATING		3273275205540001
34	9	1471089	IDA ROHIMAH		3273275808760003
35	9	69236526	RINI ANGGRAENI		3273276808700002
36	9	67386160	EVI SUPRIHATININGSIH		3273252504910005
37	9	67220946	ANAH		3273274807480002
38	9	67385376	TERI ANDRIYANI		3273275204980003
39	9	5283004	YANI BIDIANTI		3273276601850001
40	9	118591265	POPON		3273274507650004
41	9	95361	IIN		3273275502580001
42	9	67272235	IKA SARTIKA		3273276909760002
43	9	958437	WIHARYA		3273271505750002
44	9	118591594	DARMAH		3273275112430001
45	9	67220582	ELI NURHASANAH		3273274704910001
46	9	69292799	DEDE DHEA		3273276705770001
47	9	67220932	NURDIANA		3273274805850002
48	9	3421269	LISNAWATI		3273274807740002
49	9	67195851	ENDANG SUSILAWATI		3273275906870001
50	9	67385173	IPAH		3273274503560002
51	9	67195865	GOM ROHMAH		3273275908650002
52	9	67357803	KURNIAWAN		3273272308840002
53	9	3421250	DEDEH		3273274107620003
54	9	1471099	NEVA		3273275902570001
55	9	3421200	WATI		3273274103650002
56	9	90773	ERNAWATI		3273274403810002
57	9	91812	ENENG KARTIKA		3273274303830001
58	9	67195956	EDAH		3273276010600002
59	9	67377858	ANDRI MULYADI		3273270202900001
60	9	958435	SITI ROBIAH		3273274805820004
61	9	93418	APONG		3273274507570003
62	9	118591608	LIA YULIA		3273276406760003
63	9	89741	ICEU ROSNAWATI		3273274807890002
64	9	3421266	ADE KOMARIAH		3273276211680002
65	9	67196257	UTIN SUTIJAH		3273276108670003
66	9	67196334	ASHI		3273276302740003
67	9	958433	KAI SATI		3273275203590002
68	9	88002	RITA		3273276612810001
69	9	67223865	ETI		3273275109580001
70	9	96561	WATINI		3273275004770002
71	9	3421268	WARISAH		3273274301490001
72	9	958434	NENDEN SINTAWATI		3273274712820002
73	9	67221527	EMPAT		3207335509500001
74	9	90607	SUMARNI		3273274706720003
75	9	118591601	KOMARIAH		3273276504630001
76	9	3421252	EMUN		3273274710760001
77	9	958436	UUM AMINAH		3273274309770003
78	9	67208402	ENI SURYANI		3273274409750007
79	9	958432	ELIH RAHMAWATI		3273275007680002
80	9	3421271	INDRI LESTARI		3273275110960001
81	9	3421267	KARWATI		3273274904610001
82	9	67183909	EKA FITRI ANDRIANI		3273275704950003
83	9	67380567	OSIN		3273271704400001

DATA PENERIMA BPNT